Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-6

SKRIPSI

Oleh:

Nama	: Pandu Syalsa Ramadhan
Nomor Mahasiswa	: 18313176
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2021

Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-6

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Pandu Syalsa Ramadhan
Nomor Mahasiswa	: 18313176
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2022

Penulis,



Pandu Syalsa Ramadhan

PENGESAHAN

Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-6

Nama	: Pandu Syalsa Ramadhan
Nomor Mahasiswa	: 18313176
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Prof. Jaka Sriyana, SE., MSi., PhD

PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ASEAN-6

Disusun Oleh : **PANDU SYALSA RAMADHAN**

Nomor Mahasiswa : **18313176**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 09 Februari 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana,Prof.,S.E.,M.Si., Ph.D. .....

Penguji : Mohammad Bekti Hendrie Anto,,S.E., M.Sc. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

Berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan.

– Imam Syafi'i –

Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

– Jalaluddin Rumi –

" *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri* "

(QS Ar – Ra'd ayat 11)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda Liana Anjasari dan Ayahanda Ikhwanudin tercinta yang telah memberikan segala pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan. Terimakasih telah menjadi orang tua yang istimewa dan sempurna dunia akhirat.
2. Diri saya sendiri yang telah berusaha, berproses dan berjuang hingga dapat menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-6"**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap masukan berupa saran dan kritik yang membangun agar dapat dijadikan bahan perbaikan karya ilmiah ini serta sebagai motivasi peneliti untuk meningkatkan kemampuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu dengan kerendahan hati serta besar harapan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya untuk motivasi, saran dan arahan selama bimbingan. Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah bapak berikan.
2. Kedua orang tua saya, Ibunda Liana Anjasari dan Ayahanda Ikhwanudin yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tiada henti untuk anaknya. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik dalam hidup saya.
3. Adik-adik saya, Sasa Sahwa dan Nazriel yang telah memberikan dukungan baik perhatian, kasih sayang dan semangat dikala penat.
4. Adinda Afiah Syahda yang selalu support dalam kondisi apapun dan setia menemani disaat saya sambat. Terimakasih karenamu telah memberi tahu artinya optimis dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
5. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Teman-teman Seperjuangan (TSPJ) Dhani Aditya Nugraha, M. Didin Wahyudin, Firda Rahmadianty Lestari, dan Sulastri Mayang Sari yang telah menjadi saudara dalam perjalanan hidup saya.
9. TimNYANDUNG Alwi Andika, Insan Setiawan, Nurrohidin, Andika Triyanto, M. Reza Saputra, dan Axcal Fattuloh yang telah menjadi teman sepermainan dan seperjuangan. Bismillah sukses
10. Bang Ilham Assagaf yang selalu memberikan arahan serta dukungan moral selama perkuliahan.
11. Bahrul Ulum, Rafka Darmawan, Albert Dahril M. , Naufal Syafiq P. yang menjadi teman seperjuangan semasa perkuliahan. Sukses selalu untuk kita semua.
12. Keluarga besar HMI FBE UII yang selalu menjadi pelopor semangat juang dalam aktivitas organisasi maupun akademik.
13. Teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 2018 yang selalu berjuang dalam perkuliahan
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang memerlukan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha kita. Amin

Wssalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2022

Pandu Syalsa Ramadhan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ii
PENGESAHAN iii
PENGESAHAN UJIAN iv
HALAMAN MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Sistematika Penulisan 10
BAB II 11
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 11
2.1 Kajian Pustaka 11
2.2 Landasan Teori 16
2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 16
2.2.2 Tata Kelola Pemerintah 22
2.2.3 Indeks Tata Kelola Pemerintah (*World Governance Index*) 26
2.2.4 Indikator Tata Kelola Dunia (Worldwide Government Indicators) 27
2.3 Kerangka Pemikiran 29
2.4 Hipotesis Penelitian 30
BAB III 31
METODE PENELITIAN 31
3.1 Jenis dan Sumber Data 31

3.2 Definisi Operasional Variabel 31
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 31
3.2.2 Indikator Tata Kelola Pemerintah (*World Governance Indicators*) 32
3.3 Metode Analisis 32
3.3.1 Model Regresi Data Panel 33
3.3.2 Penentuan Metode Regresi Data Panel 35
3.3.3 Uji Statistika 37
BAB IV 39
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 39
4.1 Deskriptif Data Penelitian 39
4.1.1 Government Effectiveness 39
4.1.2 Rule of Law 40
4.1.3 Control of Corruption 41
4.1.4 Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism 42
4.2 Hasil dan Analisis Data 44
4.2.1 Common Effect Model (CEM) 44
4.2.2 Fixed Effect Model (FEM) 45
4.2.3 Random Effect Model (REM) 45
4.3 Pemilihan Model Terbaik 46
4.3.1 Uji Chow 47
4.3.2 Uji Hausman 48
4.3.3 Hasil Model Terbaik *Fixed Effect Model* 49
4.4 Uji Statistik 51
4.4.1 Koefisien Determinasi $R2$ 51
4.4.2 Uji Simultan (Uji F) 51
4.4.3 Uji Parsial (Uji t) 51
4.5 Pembahasan dan Interpretasi Data 53
4.5.1 Analisis Pengaruh Variabel *Government Effectiveness* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 Negara ASEAN 55
4.5.2 Analisis Pengaruh Variabel *Rule of Law* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 Negara ASEAN 55
4.5.3 Analisis Pengaruh Variabel *Control of Corruption* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 Negara ASEAN 56

4.5.4 Analisis Pengaruh Variabel *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 Negara ASEAN..... 57
BAB V..... 59
SIMPULAN DAN IMPLIKASI..... 59
5.1 Simpulan..... 59
5.2 Implikasi..... 60
DAFTAR PUSTAKA..... 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 13
Tabel 4. 1 Hasil Estimasi Common Effect Model 44
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Fixed Effect Model 45
Tabel 4. 3 Hasil Estimasi Random Effect Model 46
Tabel 4. 4 Uji Chow (Uji F-Statistik) 47
Tabel 4. 5 Uji Hausman 48
Tabel 4. 6 Uji t 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Tahun 2006 - 2020 (%)..... 5
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian..... 30
Gambar 3. 1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model..... 37
Gambar 3. 1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model..... 37
Gambar 4. 1 *Government Effectiveness* di 6 Negara ASEAN 2006-2020..... 40
Gambar 4. 2 Rule of Law di 6 Negara ASEAN 2006-2020..... 41
Gambar 4. 3 Control of Corruption di 6 Negara ASEAN 2006-2020..... 42
Gambar 4. 4 Political Stability And Absence Of Violence/Terrorismdi 6 Negara ASEAN 2006-2020..... 43
Gambar 4. 5 Nilai Intersep atau konstanta Cross Effect..... 53
Gambar 4. 6 Nilai Intersep atau konstanta Period Effect..... 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 DATA PENELITIAN 66
Lampiran 2 Common Effect Model 69
Lampiran 3 Fixed Effect Model 70
Lampiran 4 Random Effect Model 71
Lampiran 5 Uji Chow 72
Lampiran 6 Uji Hausman 73
Lampiran 7 Intersep Cross Effect 74
Lampiran 8 Intersep Period Effect 74

ABSTRAK

Peran pemerintah dalam melaksanakan *Good Governance* atau tata kelola pemerintah yang baik adalah sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik. Dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan mekanisme pasar yang efisien sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-6. Data dalam penelitian ini menggunakan data panel yang bersumber dari *Worldwide Governance Indicator* pada *World Bank*. Dengan data *cross section* 6 negara ASEAN dan data *time series* periode 2006 – 2020. Hasil model terbaik regresi data panel adalah menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa variabel yang memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN adalah *government effectiveness*. Sedangkan variabel *rule of law, control of corruption,* dan *political stability and absence violence/terrorism* memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN.

Kata kunci : Pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintah, World Bank.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wibowo (2013), berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Keberhasilan kinerja perekonomian suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat ke arah positif. Hal ini kemudian jika suatu negara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka semakin maju negara tersebut dalam bidang pembangunannya. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak selalu tumbuh, namun akan terpengaruh fluktuasi pasang surut akibat adanya krisis sehingga membawa ke arah kelesuan ekonomi (Aprillia dan Hariyanti, 2014).

Di dalam konteks perekonomian, menurut Sari dan Kaluge (2017), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu isu yang penting untuk dibahas serta dikaji secara berkelanjutan, di mana setiap negara selalu meningkatkan target ekonomi dalam kurun waktu jangka panjang sebagai indikator keberhasilan suatu negara.

Tujuan utama dari setiap negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula, tidak terkecuali negara maju maupun negara berkembang. Menurut Sukirno (2008), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Menurut Kuznet dalam Demarani (2018), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan jangka panjang dalam penawaran suatu negara dengan banyak jenis barang ekonomi kepada masyarakat: kemampuannya tumbuh dalam penyesuaian lembaga, kemajuan teknologi dan ideologis yang diperlukannya.

Menurut Dewi dan Triaryati (2015), selama ini dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi hanya dilihat dari faktor-faktor ekonomi semata seperti suku bunga, pajak, FDI (*Foreign Direct Investment*), inflasi, investasi. Di sisi lain ada faktor lain yang masih sedikit untuk dijadikan objek penelitian, seperti tata kelola pemerintah. Hal ini menarik untuk dikaji atau diteliti, karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Dengan membangun landasan demokratis sebagai upaya penyelenggaraan negara serta pembenahan fungsi penyelenggara pemerintah adalah langkah awal untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (Sedarmayanti, 2013).

Konsep *Good Governance* pertama kali dipelopori oleh *World Bank*, UNDP dan *Asian Development Bank* (ADB), kemudian dari gagasannya tersebut dikembangkan oleh banyak pakar di setiap negara untuk menciptakan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Mengutip dari laporan *world bank* yang ditulis Kaufman, Kraay dan Zoido-Lobatón (2005), menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang stabil, serta sosial ekonomi menuju ke arah yang lebih baik.

World Bank mengemukakan *Good Governance* adalah sebagai upaya melaksanakan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab searah prinsip demokrasi, prinsip pasar yang efisien, menghindari penyalahgunaan alokasi dana investasi, dan mencegah terjadinya tindakan korupsi baik secara administratif maupun politik, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *World Bank* sebagai pelopor gagasan *Good Governance* program pengelolaan sektor publik, untuk menciptakan tatanan pemerintah yang baik dalam rangka prasyarat bantuan pembangunan dan sebagai pelopor gagasan *Governance exercise of political power to manage nation*, di mana kesepakatan politik dan konsensus adalah prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan.

World Bank melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group*, tahun 1996 mengutarakan *Worldwide Governance Indicators Project*. Ada enam indikator agregat yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintah yaitu : *Rule of Law, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Voice and Accountability,*

Control of Corruption and Political Stability and Absence of Violence/Terrorism. Setiap indikator yang diutarakan oleh Bank Dunia menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5 . di mana nilai -2,5 menggambarkan bahwa pencapaian setiap indikator *worldwide governance indicators* untuk suatu negara tersebut dianggap sangat buruk, sedangkan nilai 2,5 menggambarkan bahwa pencapaian setiap indikator *worldwide governance indicators* untuk suatu negara tersebut dianggap sangat baik. Menurut Kharisma (2014), untuk membangun pemerintahan yang baik maka intervensi pemerintah perlu dikurangi (*less government*), dikhawatirkan *big government* akan menjadi sumber *bad government*. Pemerintahan yang buruk dicirikan oleh pemerintahan yang tidak representatif dan sistem ekonomi non-pasar tidak efisien, di mana pada kenyataannya bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan di suatu negara.

Menurut Zaroni (2015), Globalisasi Ekonomi merupakan proses di mana banyak negara yang berpartisipasi pada aktivitas ekonomi secara menyeluruh, yang ditandai dengan menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang melibatkan banyak negara. di mana pada akhirnya arus globalisasi semakin tidak terbendung serta tidak dapat dihindari, yang mengakibatkan persaingan global menjadi semakin nyata. Globalisasi mendorong terciptanya kawasan-kawasan integrasi ekonomi daerah, sebagai upaya untuk menjawab tantangan globalisasi dan menjadi lebih kompetitif.

Terdapat beberapa kawasan integrasi ekonomi regional di dunia, salah satunya *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). ASEAN sendiri merupakan organisasi kerja sama regional Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara, dengan tujuan yang sama yakni adalah untuk menciptakan kerja sama dalam hal pertumbuhan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas: di antaranya Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

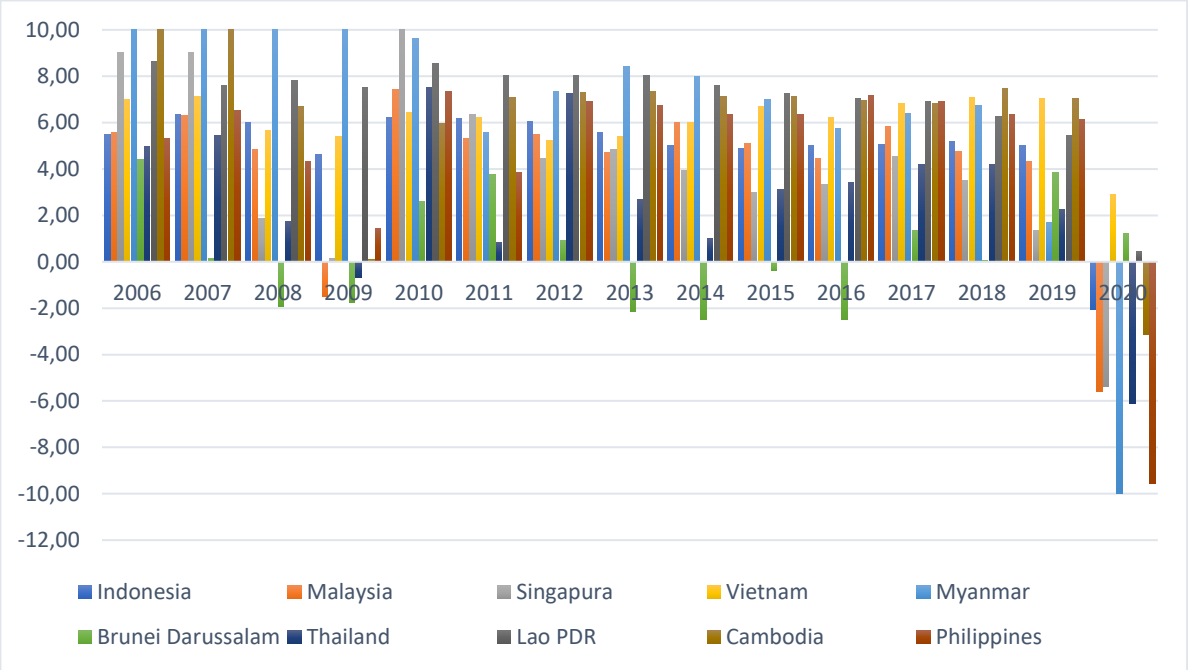
Syaifullah dan Malik (2017), adapun negara-negara anggota ASEAN memiliki kesepakatan, salah satunya dalam bidang perekonomian yang sekarang dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), yang bertujuan menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang memiliki daya saing tinggi dan terintegrasi ke

dalam perekonomian dunia, serta memperkuat perekonomian di negara anggota ASEAN.

Menurut Sari dan Kaluge (2017), dalam kenyataannya pertumbuhan di negara anggota ASEAN masih fluktuatif. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan tujuan awal dibentuknya ASEAN yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di negara kawasan ASEAN. Untuk itu setiap negara berupaya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nya agar tidak kalah saing dengan negara lain atau negara-negara tetangga (Rahman dan Jakaria, 2015). Berdasarkan *The Global Economy*, *Wold Bank Gross Domestic Product* (GDP) beberapa negara di kawasan Asia Tenggara mengalami keadaan yang cenderung fluktuasi. Capaian pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan GDP, intervensi pemerintah sangatlah penting dalam keberlangsungan perekonomian suatu negara. di mana negara-negara Asia Tenggara juga memiliki perekonomian yang cukup stabil dan ketahanan terhadap tantangan era globalisasi.

Penelitian ini akan berfokus pada enam negara ASEAN yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Kamboja. Pemilihan negara-negara tersebut didasarkan berbagai karakteristik yang berbeda-beda dari negara-negara tersebut, sehingga akan mendapatkan hasil yang komprehensif. Karakteristik tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, kondisi politik dan tata kelola pemerintahan. Berikut adalah grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN :

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Tahun 2006 - 2020 (%)



Sumber: *World Bank* 2021, diolah

Jika dilihat dari gambar 1.1 grafik di atas, menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN selama tahun 2006-2020. di mana pertumbuhan ekonomi ASEAN memiliki rata-rata 4.78 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 2006-2020 yaitu Laos sebesar 7.01 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah selama 2006-2020 yaitu Brunei Darussalam sebesar 0.47 persen. di mana pada tahun 2006-2019 perkembangan pertumbuhan ekonomi ASEAN relatif cenderung stabil. Namun pada awal tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia mengalami resesi, termasuk negara-negara di ASEAN.

Beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -2.07 persen, Malaysia sebesar -5.59 persen, Thailand sebesar -6.09 persen, Laos sebesar 0.44 persen, Singapura sebesar -5.39 persen, Myanmar sebesar -9.99 persen, Kamboja sebesar -3.14 persen, dan Filipina sebesar -9.57 persen, artinya pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Adapun Thailand, Myanmar, dan Filipina mengalami

penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, sedangkan Laos sebesar 0.44 persen, Brunei Darussalam sebesar 1.20 persen dan Vietnam sebesar 2.91 persen, ketiga negara tersebut menunjukkan nilai yang positif. Hal ini disebabkan dengan adanya wabah *Coronavirus* (COVID-19) yang melanda negara di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak luar biasa bagi perekonomian global sehingga negara-negara di seluruh dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, baik negara maju maupun negara berkembang.

Melihat dari kondisi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN yang bergerak dinamis, pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki otoritas untuk melaksanakan kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara guna mendorong laju perekonomian. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas pemerintah itu sendiri. Menurut Kasim dalam Razak & Suhadak (2019), *Governance* yaitu proses penggunaan otoritas eksekutif pada praktik pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi dalam memajukan pembangunan masyarakat. Keberhasilan *Good Governance* juga ditentukan dengan adanya keterlibatan antara peran pemerintah, *privat sector* dan masyarakat.

Negara melalui pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai *Good Governance* agar meminimalisir terjadinya tindakan penyimpangan. Artinya menurut Assagaf (2020), jika pemerintahan berjalan dengan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik juga, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mendukung masyarakat yang damai serta pembangunan berkelanjutan yang inklusif, memberikan akses keadilan untuk semua dan membangun sistem kelembagaan yang efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan inklusif di semua level. Menurut Handayani & Nur (2019) negara dikatakan sukses jika pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan memegang teguh tiga dasar pembangunan berkelanjutan dalam bidang perekonomian, sumber daya manusia dan lingkungan. *Good Governance* setidak-tidaknya harus mencapai prasyarat adanya partisipasi, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta keadilan.

Bayar (2016), berpendapat bahwa *government effectiveness* berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal tersebut relevan dikarenakan kualitas yang ditawarkan pemerintah baik, kualitas formulasi kebijakan dan implementasinya semakin baik serta komitmen atas kebijakan pemerintah yang kredibel. Pendapat serupa juga dari penelitian Assagaf (2020), mengungkapkan *government effectiveness* berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang tepat sasaran dalam menerapkan kebijakan sehingga memperkecil ruang terjadinya tindakan korupsi serta pengelolaan pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan publik.

Selain *government effectiveness*, *rule of law* juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi terkhusus negara di ASEAN. di mana *rule of law* merupakan salah satu indikator utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sebab *rule of law* mampu menghambat kewenangan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan korupsi, sehingga pemerintah patuh terhadap hukum dan mampu menjalankan tanggung jawab dan tupoksinya dengan baik dan bersih. Menurut Wibowo (2013), *rule of law* memiliki pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut seandainya terjadi, karena adanya peningkatan dalam kepatuhan masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku. Hasil serupa juga diungkapkan oleh penelitian dari Haggard & Tiede (2008), adanya hubungan kausalitas yang signifikan antara *rule of law* terhadap pertumbuhan ekonomi.

Fenomena korupsi yang tinggi merupakan masalah yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Menurut Klitgard dalam Waluyo (2010), mengatakan bahwa lemahnya birokrasi dan penegakan hukum dianggap menjadi penyebab utama terjadi tindakan korupsi yang marak di banyak negara. Hal ini akan mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Menurut *World Bank*, *Control of corruption* adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kekuasaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan upaya melakukan korupsi. Bayar (2016), pada penelitiannya menyatakan bahwa *control of corruption* memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dalam penelitian dari Huynh dan

Jacho-Chavez (2009) menyatakan bahwa *control of corruption* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya yaitu *political stability and absence of violence/Terrorism* yang menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. *Political stability and absence of violence/Terrorism* juga sebagai alat pengukur persepsi tentang ketidakstabilan politik dan kekerasan politik, salah satunya terorisme. Menurut penelitian Asbarini dkk (2021) menyatakan bahwa *political stability and absence of violence/Terrorism* mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penelitian serupa dari Resnick dan Birner (2006) menyatakan bahwa *political stability* mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat bahwa pentingnya pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengangkat penelitian dengan judul **"Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-6"**

1.2 Rumusan Masalah

Selain variabel FDI (*Foreign Direct Investment*), suku bunga, konsumsi, pajak dan inflasi, variabel tata kelola pemerintah juga dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Adapun variabel yang terdapat di dalamnya *government effectiveness, rule of law, control of corruption* dan *political stability and absence of violence/Terrorism*. Beberapa data mengenai tata kelola pemerintah yang baik khususnya di negara ASEAN menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah yang baik tidak serta-merta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Basu dalam Wibowo (2013) *good governance* adalah suatu konsep yang multidimensi untuk diteliti, dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum dan ketertiban, kemampuan layanan publik untuk membangun modal manusia, penyediaan infrastruktur fisik, ekonomi atau manajemen dalam struktur pemerintahan sehingga menciptakan kesejahteraan.

Dari hasil penjelasan di atas peneliti menganalisis bagaimana peran pelaksanaan tata kelola pemerintah dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya untuk mengetahui :

1. Bagaimana pengaruh *government effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2020?
2. Bagaimana pengaruh *rule of law* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2020?
3. Bagaimana pengaruh *control of corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2020?
4. Bagaimana pengaruh *political stability and absence of violence/Terrorism* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh tata kelola pemerintahan (*government effectiveness, rule of law, control of corruption* dan *political stability and absence of violence/Terrorism*) terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN dari tahun 2010-2020?

1. Menganalisis pengaruh *government effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2020.
2. Menganalisis pengaruh *rule of law* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2020.
3. Menganalisis pengaruh *control of corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2020
4. Menganalisis pengaruh *political stability and absence of violence/Terrorism* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Harapannya dapat memberikan referensi dalam penelitian berikutnya perihal pengaruh tata kelola pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman mengenai tata kelola pemerintah di negara-negara ASEAN.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Menjelaskan kajian pustaka, landasan teori, hipotesis yang digunakan serta menggambarkan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis dan sumber data, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran, daftar pustaka, dan lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik berkaitan dengan indeks tata kelola pemerintahan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan data pendukung pada penelitian ini :

Asbarini, Laili Isnaini, & Wibowo (2021), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dan pengujian hipotesis. di mana dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Control of corruption* dan variabel *Voice and Accountability* tidak memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel *Political Stability, Government Effectiveness*, *Rule of Law* dan *Regulatory Quality* memiliki pengaruh yang positif yang artinya variabel tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Assagaf (2020), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara di ASEAN). Data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel dan menggunakan model terbaik yaitu Random *Effect Models*. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *government effectiveness, regulatory quality,* dan *rule of law* berpengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel *control of corruption* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara ASEAN.

Ramadhan, (2019), melakukan penelitian dengan judul *Assessing Of The Impact Of Good Governance And Institutions On Economic Growth In* Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari *International Monetary Fund* (IMF) dan *Asia Regional Integration Center-Asian*

Development Bank (ARIC-ADB) dengan menggunakan *time series* dengan rentang waktu 2000Q1-2018Q4. Penelitian ini menggunakan *Generalized Methods of Moments* (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *, control of corruption, voice and accountability, political stability and absence of violence and government effectiveness* berpengaruh signifikan dengan probabilitas di bawah nilai alpha. Sedangkan variabel *rule of law and quality of regulation* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Annur (2019), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun 2007-2017. Analisis dalam penelitian ini dengan melakukan pemilihan metode regresi data panel dengan model terbaik yaitu *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Government Effectiveness, political stability and absence of violence, voice and accountability* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Sedangkan variabel *Regulator Quality* memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN.

Razak & Suhadak (2019), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Worldwide Governance Indicators* dan *Macroeconomic* Terhadap IHSG (Studi pada Negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura Tahun 2004-2016). Penelitian ini menggunakan *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis *Partial Least Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *worldwide governance indicators* memiliki pengaruh terhadap *macroeconomic* pada negara Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. *Worldwide governance indicators* tidak berpengaruh terhadap IHSG pada negara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Sedangkan *Macroeconomic* tidak memengaruhi IHSG pada negara Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Bedane dkk. (2017), dalam penelitiannya dengan judul *Government Effectiveness and Economic Growth*. Penelitian ini menggunakan alat analisis GMM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Variabel *Government effectiveness* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena tata kelola yang baik merupakan salah satu tujuan dari *Millenium Development Goals* (MDGs).

Gaol (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode data panel dan menggunakan model terbaik yaitu *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian ini menjelaskan variabel *control of corruption, government effectiveness, rule of law,* dan *voice and accountability* tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN, akan tetapi variabel *regulatory quality* dan *political stability and absence violence* memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Bayar (2016), melakukan penelitian dengan judul *Public Governance and Economic Growth in the Transitional Economies of the European Union*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel *regulatory quality* berpengaruh positif signifikan, selain itu *control of corruption*, *rule of law* pun memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Uni Eropa. Akan tetapi variabel *political stability/Teroris* mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa.

Kaufmann dkk. (2005), melakukan penelitian dengan judul *Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004*. Penelitian ini menggunakan alat analisis data panel. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel *Quality of Governance* di beberapa negara sudah berubah signifikan (di kedua arah) dengan memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tidak adanya kecenderungan untuk kondisi yang lebih baik atau buruk dalam rata-rata global pemerintah.

Tabel 2. 1 **Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
1.	Asbarini, Laili Isnaini, & Wibowo (2021)	Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN	❖ Pertumbuhan Ekonomi ❖ *Governance Effectiveness, Control of Corruption, Political Stability, Voice and Accountability, Regulatory Quality, Rule of*	Data panel dengan *Fixed Effect Models* (FEM)	Variabel *Control of corruption* dan *variabel Voice and Accountability* tidak memiliki pengaruh. Di sisi lain, variabel *Governance Effectiveness, Government Effectiveness, Political Stability, Regulatory*

			Law, Jumlah Penduduk		*Quality dan Rule of Law* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN
2.	Assagaf (2020)	Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara di ASEAN)	❖ Pertumbuhan Ekonomi ❖ WGI: g*overnment effectiveness, regulatory quality, rule of law,* dan *control of corruption.*	Data Panel dengan *Random Effect Model* (REM)	Variabel *regulatory quality, government effectiveness,* dan *rule of law* berpengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel *control of corruption* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara ASEAN.
3.	Ramadhan, (2019)	*Assessing Of The Impact Of Good Governance And Institutions On Economic Growth In Indonesia*	❖ *Economic growth* ❖ *political stability and absence of violence, Voice and accountability, control of corruption and government effectiveness, rule of law and quality of regulation.*	*Generalized Methods of Moments (GMM)*	Variabel *political stability and absence of violence, Voice and accountability, control of corruption and government effectiveness* berpengaruh signifikan dengan probabilitas di bawah nilai alpha. Sedangkan *, rule of law and quality of regulation* memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	Annur (2019)	Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun 2007-2017	❖ Pertumbuhan Ekonomi ❖ *regulatory quality, political stability and absence of violence, government effectiveness, voice and accountability.*	Panel Data menggunakan *Random Effect Model* (REM)	Variabel *Government Effectiveness, political stability and absence of violence, voice and accountability* memiliki hubungan positif dan signifikan. Akan tetapi variabel *Regulator Quality* memiliki hubungan

					positif dan tidak signifikan.
5.	Razak & Suhadak (2019)	Pengaruh *Worldwide Governance Indicators* dan *Macroeconomic* Terhadap IHSG (Studi pada Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand Tahun 2004-2016)	❖ IHSG ❖ *Worldwide Governance Indicators* dan *Macroeconomic*	PLS	*Worldwide governance indicators* memiliki pengaruh terhadap *macroeconomic* negara Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand. *Worldwide governance indicators* tidak memiliki pengaruh terhadap IHSG pada negara Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan *Macroeconomic* memiliki pengaruh terhadap IHSG pada negara Malaysia, Filipina, dan Thailand.
6.	Bedane dkk. (2017)	*Government Effectiveness and Economic Growth*	❖ *Economic growth* ❖ *Government effectiveness*	*System GMM technique*	Variabel *Government effectiveness* berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7.	Gaol (2016)	Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN	❖ Pertumbuhan Ekonomi ❖ *Good Governance* : *control of corruption, political stability and absence violence, government effectiveness, rule of law, regulatory quality,* dan *voice and accountability*	Panel data dengan *Fixed Effect Model* (FEM)	Variabel *control of corruption, rule of law, government effectiveness*dan *voice and accountability* tidak signifikan akan tetapi variabel *political stability and absence violence dan regulatory quality* memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

8.	Bayar (2016)	*Public Governance and Economic Growth in the Transitional Economies of the European Union*	❖ *Economic growth* ❖ *political stability and the absence of violence/terrorism, Voice and accountability, regulatory quality, government effectiveness, control of corruption and rule of law*	Data panel	Variabel *regulatory quality* memiliki pengaruh positif signifikan, selain itu *control of corruption*, *rule of law* pun berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi variabel *political stability* mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
9.	Kaufmann dkk. (2005)	*Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004*	❖ *Worldwide Governance Indicators* ❖ *Voice and Accountability, Political Instability and Violence, Government Effectiveness, Regulatory Burden, Rule of Law, and Control of Corruption*		*Quality of Governance* di beberapa negara sudah berubah signifikan (pada kedua arah) dengan memberikan bukti, menjelaskan bahwa tidak ada kecenderungan untuk kondisi yang lebih baik atau buruk dalam rata-rata global pemerintah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Todaro dan Smith (2006), mengemukakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan *output* dari periode ke periode dan sebagai parameter capaian pembangunan pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan sejauh mana kegiatan perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat selama periode waktu tertentu. Demikian tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu negara maka akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan.

Annur (2019), tingginya pertumbuhan ekonomi didukung oleh proses pembangunan ekonomi yang dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, di mana hasil tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, baik kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi maupun pendapatan rendah. Ketika kewajiban pembangunan ekonomi diserahkan pada kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi, otomatis akan bisa mengendalikan pertumbuhan tersebut dengan baik, apabila yang dipilih dominan dari kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, maka hasil dari pembangunan wajib disamaratakan. Hal ini minim kemungkinan *Gross National Produk* secara nasional akan mengalami peningkatan.

Todaro dan Smith (2006) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produktif pada perekonomian yang terus menerus atau berkelanjutan, hingga mendapatkan tingkat pendapatan serta output nasional semakin tinggi. Terdapat tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap masyarakat, di antaranya:

1. Akumulasi modal, sebagai investasi baru yang di dalamnya berbentuk peralatan fisik, tanah, dan meningkatkan SDM bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan kerja;
2. Pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan adanya peningkatan angkatan kerja;
3. Kemajuan teknologi merupakan sebuah metode dalam mempercepat pekerjaan selesai.

Dalam teori Adam Smith, bahwa pembangunan ekonomi adalah sebuah proses kombinasi antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Sementara Todaro dalam Akhmaddhian (2016) mendefinisikan pembangunan adalah proses multi dimensional yang terkait dengan perubahan dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, lembaga nasional ataupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan penghapusan dari kemiskinan absolut.

Haryanto (2013), secara umum tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga stabilitas perekonomian negara dan mendistribusikan pendapatan secara merata. Adanya pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Fuceri dan Karras dalam Assagaf (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari hasil kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan yang dilakukan dari berbagai aspek sektor ekonomi yang secara tidak langsung dapat memberikan gambaran terkait tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori Klasik adalah teori yang sudah berkembang sejak abad ke-17, di mana terdapat dua tokoh yang sangat berpengaruh di era klasik yaitu David Ricardo dan Adam Smith. Dalam bukunya Adam Smith *An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1976), mengatakan tentang proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara sistematis. Sedangkan dalam teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, terdapat dua aspek dalam proses pertumbuhan ekonomi, yaitu :

A. Pertumbuhan Output Total

1. Sumber daya alam yang tersedia

Menurut Adam Smith, sumber daya alam adalah sumber paling dasar dari aktivitas produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas atas dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan walaupun sumber daya tidak digunakan secara penuh. Selain itu unsur jumlah penduduk dan stok modal memegang peran penting dalam pertumbuhan output.

2. Jumlah penduduk

   Dalam proses pertumbuhan output, jumlah penduduk memiliki peran pasif, artinya penduduk akan menyesuaikan diri dengan permintaan tenaga kerja.

3. Stok barang modal

   Menurut Smith stok kapital atau stok barang modal, merupakan unsur produksi yang memiliki peran aktif dalam menentukan output. Peranan modal dalam teori pertumbuhan menempati posisi yang sentral dan penting bagi proses pertumbuhan output, akibatnya tingkat pertumbuhan memengaruhi laju pertumbuhan stok modal terhadap output total baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Pertumbuhan Penduduk

   Adam Smith mengatakan bahwa jumlah penduduk yang tinggi dipengaruhi adanya upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan upah *subsisten* (tingkat upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari). Menurut Smith juga upah ditentukan oleh stok modal dan peningkatan output.

Teori pertumbuhan Klasik mengalami perkembangan lebih pesat di tangan David Ricardo. Dalam teorinya Ricardo menyatakan bahwa akumulasi kapital dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, di sisi lain juga akan memperlambat kinerja *Law of Diminishing Return* sehingga memperlambat taraf hidup minimal. Adapun ciri-ciri proses pertumbuhan yang dijelaskan David Ricardo sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah tanah (faktor produksi).
2. Kenaikan atau penurunan kesiapan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah atau disebut tingkat upah alamiah (*natural wage*).
3. Akumulasi modal terjadi ketika laba minimal dibutuhkan untuk menarik melakukan investasi.
4. Kemajuan teknologi yang pesat dari waktu ke waktu.
5. Sektor pertanian masih mendominasi dalam perekonomian.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Teori ekonomi Keynes menyatakan bahwa peningkatan belanja (konsumsi) masyarakat dalam perekonomian, akan mendorong dan meningkatkan belanja sehingga pendapatan pada masyarakat pun meningkat. Adapun dampak nya yaitu menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak. Siklus ini seiring dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal atau ke arah yang lebih baik. Akan tetapi ketika terjadi *Great Depression*, masyarakat secara alami cenderung menahan belanja dan menimbun uang. Hal ini mengakibatkan siklus perputaran uang terhenti dan perekonomian menjadi lumpuh.

Demarani (2018), solusi yang ditawarkan Keynes adalah dengan intervensi oleh pemerintah. Keynes mengatakan bahwa adanya intervensi pemerintah untuk meningkatkan konsumsi atau belanja masyarakat, dengan cara menyuplai uang atau melakukan belanja barang dan jasa di pemerintah itu sendiri. Dalam teori Keynes menganjurkan adanya campur tangan dari sektor publik guna meningkatkan perekonomian secara umum. Hal ini bertentangan dengan teori kapitalisme yaitu membiarkan ekonomi bergerak bebas apa adanya untuk mencapai keseimbangannya sendiri (*laizes-faire capitalism)*.

Dalam teori Keynes mengkritik adanya kebijakan pemerintah terlalu mendorong tabungan dan tidak terlalu mendorong konsumsi. Keynes juga menganjurkan distribusi kekayaan yang terkontrol sesuai kebutuhan. Teori keynes menyebutkan alasan pragmatis pada distribusi kemakmuran yaitu ketika segmen masyarakat miskin menerima sejumlah uang, maka akan cenderung membelanjakannya dari pada menyimpannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Selain teori pertumbuhan klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo, ada teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang dikembangkan oleh Robert Sollow dan T.W. Swan. Teori neo-klasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh bertambah

serta berkembangnya faktor-faktor yang memengaruhi penawaran agregat. Menurut Sukirno (2008), teori pertumbuhan ini mengutamakan faktor produksi dan kemajuan teknologi adalah penentu pertumbuhan ekonomi. Fungsi produksi bersifat *constant return to scale* sehingga ketika modal dan tenaga kerja digandakan dan input baru yang digunakan sama pentingnya dengan input yang ada, produksi akan meningkat pada tingkat yang sama. Input selain modal, tenaga kerja dan pengetahuan dianggap tidak signifikan.

Dalam model Sollow Swan, faktor pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, perkembangan teknologi (eksogen), serta ukuran output saling berhubungan. Tingkat pertumbuhan bermula dari tiga penyebab: akumulasi modal, peningkatan pasokan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini dapat diakui sebagai peningkatan keterampilan dan kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas.

4. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen adalah teori yang menolak asumsi model Sollow tentang perubahan teknologi yang datang dari luar. Tidak adanya penurunan tingkat pengembalian modal merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan model Sollow (Mankiw, 2006). Di sisi lain pertumbuhan endogen, investasi dan tabungan dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Pada teori ini faktor-faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan bukan hanya modal dan tenaga kerja, akan tetapi teknologi, kewirausahaan, bahan baku dan material juga memengaruhi pertumbuhan. Di sisi lain dalam teori ini juga menganggap ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, hukum dan peraturan, birokrasi, perdagangan internasional (*term of trade*) serta kebijakan pemerintah merupakan faktor yang penting memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Tata Kelola Pemerintah

United National Development Program (UNDP) menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang baik bersifat partisipatif, yang berarti bahwa setiap anggota lembaga pemerintah memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Proses dan metode pengambilan keputusan harus bersifat transparan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif. Dalam pembuatan keputusan pemerintah, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat turut bertanggung jawab kepada publik, dan lembaga yang berkepentingan. Lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksinya, yaitu responsif menjawab kebutuhan masyarakat, memfasilitasi, dan memberi peluang daripada mengontrol serta melaksanakan sesuai dengan peraturan yang dibuat (*rule of law*).

Kharisma (2014), mengatakan bahwa konsep *governance* bukanlah sesuatu hal yang baru. di mana *government* dan *governance* dianggap sama yaitu cara melaksanakan otoritas di suatu organisasi, institusi ataupun negara. *Government* yaitu lebih mengacu terhadap entitas yang melaksanakan otoritas pemerintahan pada suatu negara. Sedangkan menurut *world bank* bahwa *governance* merupakan sebuah proses pengambilan keputusan serta proses diambil atau tidaknya suatu keputusan.

Kaufmann dkk. (2005), *governance* diartikan sebagai proses pemilihan, pengawasan dan pergantian pemerintahan, kekuasaan pemerintah secara efektif menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang sehat serta warga negara dan negara menghormati lembaga yang mengatur antara hubungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa *governance* dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengelola penyelenggaraan publik. Menurut *World Bank* dalam pengertiannya: "*The way State power is used in managing economic and social resources for development of society",* artinya sebagai cara negara untuk menggunakan kekuasaan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Di sisi lain UNDP memberi batasan bahwa *"Governance is defined as the exercise of political, economic and administrative authority*

to manage a nation's affairs" yang artinya pemerintahan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola urusan-urusan negara.

Hakim (2016) mengatakan bahwa *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi paradigma global dalam beberapa dekade terakhir. Paradigma ini didasarkan pada sebuah pembaharuan terhadap sistem pemerintahan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, keahlian, transparan, profesional, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta menciptakan keadilan masyarakat.

Sedangkan menurut Annur (2019) tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk mengembangkan proses manajemen publik yang efektif, efisien dan akuntabel yang menerima partisipasi warga negara untuk memperkuat sistem demokrasi pemerintah. Organisasi internasional menganggap tata pemerintahan yang baik sebagai prasyarat untuk pembangunan ekonomi dan upaya mengecam korupsi. Tata pemerintahan yang baik dicirikan oleh suatu pemerintah yang memegang prinsip-prinsip demokrasi.

Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya untuk menciptakan konsep *good governance* maka dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Ketiga pihak ini bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Definisi *good governance* menurut *World Bank* dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan dalam proses pengelolaan atau manajemen yang kokoh dan bertanggung jawab dalam pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip pasar yang efisien agar tidak terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. *World Bank* memberi batasan tata kelola yang baik sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang terpercaya, dan pemerintahan bertanggung jawab kepada masyarakatnya.

Menurut Gerald Meier dalam Arisaputra (2013), mendefinisikan *good governance*, yaitu "prinsip yang mengatur pemerintahan memungkinkan efisiensi pelayanan publik, kredibilitas peradilan, dan akuntabilitas

pemerintahan, dan mekanisme pasar yang menjadi pertimbangan penting dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumber daya".

Pradhan dan Sanyal (2011) mengatakan bahwa tata kelola pemerintah yang baik adalah cara negara dan organisasi sosial lainnya saling berinteraksi, memiliki hubungan dengan warga negara, dengan proses pengambilan keputusan, dan bagaimana bertanggung jawab.

Konsep *good governance* yang dibawa oleh *World Bank* dan UNDP akhirnya belum juga disepakati. Konsep ini diartikan sebagai solusi yang efektif dan efisien untuk pelayanan publik. Selain itu, *world bank* sebagai institusi pendonor, memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas lembaga dan meningkatkan keterampilan untuk pejabat publik dalam meningkatkan kompetensinya. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan. di mana prinsip-prinsip *good governance* meliputi :

a) *Participation*. Keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bersifat langsung dan tidak langsung melalui lembaga yang dapat mewadahi aspirasinya. Partisipasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan hukum dan moral. Partisipasi masyarakat dapat menghidupkan suatu kebijakan, karena bersumber dari wilayah masyarakat yang berkepentingan.
b) *Rule of law*. Hukum sangat berperan penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Kerangka hukum harus bersifat adil dan tidak pandang bulu.
c) *Transparency*. Transparansi didasarkan pada kebebasan masyarakat memperoleh akses informasi terkait kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi juga harus bersifat mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
d) *Stakeholder*. *Stakeholder* berperan penting untuk membangun kemitraan dengan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
e) *Consensus orientation*. Selalu berorientasi untuk kepentingan masyarakat luas yang berdasar pada kesepakatan bersama.

f) *Equity*. Seluruh masyarakat mempunyai kesempatan sama guna mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa campur tangan dari pihak manapun.

g) *Efficiency and Effectiveness*. Dalam melaksanakan program serta langkah kebijakan, pemerintah memegang teguh prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya suatu program dikatakan efektif, apabila dieksekusi sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efisien, diartikan upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan.

h) *Accountability*. Bertanggungjawab kepada masyarakat atas setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga membangun tingkat kepercayaan masyarakat.

i) *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat perlu memiliki visi yang visioner guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Selain itu, Sedarmayanti dalam Arisaputra (2013) mengkategorikan unsur-unsur tata kelola (*governance stakeholders*) menjadi tiga kategori :

1. Pemerintahan Negara; Istilah pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan negara, yang melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.
2. Pihak swasta; Pemangku kepentingan dari pihak swasta termasuk perusahaan swasta yang terlibat dalam interaksi pasar seperti: Manufaktur, Perbankan, Perdagangan, Koperasi, dan kegiatan di sektor informal.
3. Masyarakat Madani (*civil society*); Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada hakikatnya terletak di antara pemerintah dan individu, dan mencakup individu maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara politik, sosial serta ekonomi.

Dalam penerapan *good governance* memiliki peranan yang besar bagi perubahan ke arah yang positif dalam pemerintahan suatu negara. Menurut *world bank* dalam Ramadhan (2019) tujuan penerapan *good governance* yaitu

untuk membangun institusi yang efektif guna mendukung pembangunan dan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di suatu negara.

Kemudian menurut Basu dalam Pradhan dan Sanyal (2011), *good governance* adalah konsep yang memiliki tujuan guna memberikan landasan hukum dan ketertiban, serta keterampilan untuk memberikan pelayanan masyarakat guna membangun SDM, dan infrastruktur fisik, baik ekonomi ataupun manajemen birokrasi sehingga tercapai kesejahteraan. Hal ini selaras dengan teori pertumbuhan endogen. Adapun tujuan-tujuan *good governance* menurut Tunggal (2012), yaitu :

1. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
2. Aset pemerintahan dijaga dengan baik,
3. Pemerintahan yang baik dan bersih,
4. Kegiatan pemerintah dilakukan secara transparan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal dapat menumbuhkan efisiensi kinerja pemerintahan dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan penyelenggaraan *good governance* adalah untuk menerapkan sistem pemerintahan yang baik. Dengan harapan mampu memberikan nilai tambah bagi semua pihak dan menjaga kepentingan publik dalam jangka panjang.

2.2.3 Indeks Tata Kelola Pemerintah (*World Governance Index*)

Demarani (2018), mengatakan bahwa implementasi pencapaian *good governance* membutuhkan cara untuk mengukur kinerja *good governance*. Hal ini sering disebut sebagai pengukuran *Index Good Governance* (IGG). Adapun pendekatan lain yang berlandaskan pada konsep tata kelola pemerintah terutama masyarakat yang membutuhkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas serta penegakan hukum.

2.2.4 Indikator Tata Kelola Dunia (Worldwide Government Indicators)

a. *Government Effectiveness*

Efektivitas pemerintah adalah sebagai wujud implementasi pelaksanaan *good governance*. Rifayani dkk. (2013) mengatakan bahwa efektivitas pemerintahan dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanakan dan ditetapkan. Sedangkan menurut Kaufman dalam Bedane dkk. (2017) indeks *government effectiveness* merupakan ukuran unik dari efektivitas pemerintah pada sistem birokrasi yang mencerminkan persepsi tentang kualitas pelayanan publik, tingkat independensinya oleh tekanan politik, kualitas proses dan implementasi kebijakan, serta komitmen tanggung jawab dari pemerintah. Artinya kemampuan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Menurut *Millennium Challenge Corporation* evaluasi suatu negara berdasarkan faktor-faktor seperti: kompetensi pegawai negeri sipil; kemampuan mengelola politik tanpa perubahan kebijakan atau gangguan signifikan dalam layanan pemerintah; pembelajaran, fleksibilitas, dan kreativitas dalam memimpin; efisiensi pendapatan dalam mengelola anggaran; kualitas infrastruktur; konsistensi kebijakan; prevalensi kebijakan serta pelayanan publik yang efektif dan efisien.

b. *Rule of Law*

Ozpolat dkk. (2016) berpendapat bahwa *Rule of Law* adalah landasan penegakan hukum dan demokrasi, yang merupakan jaminan terbesar yang dibutuhkan masyarakat baik secara individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Faktor-faktor seperti membatasi kekuasaan negara oleh hukum dan melindungi hak dan kebebasan individu, memastikan lingkungan yang setara dan adil, menerima superioritas hukum atas setiap individu menciptakan prinsip *rule of law*.

Kaufman dalam Ozpolat dkk. (2016) *rule of law* meliputi berbagai faktor seperti kepercayaan terhadap aturan masyarakat, hukum dan ketertiban, efisiensi sistem peradilan, kualitas penegakan kontrak, hak milik dan kepercayaan kepada penegak hukum, dan pengadilan. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam indeks evaluasi *rule of law* yaitu adanya korupsi, pembatasan kekuasaan negara, negara yang terbuka, hak-hak dasar, ketertiban dan keamanan, praktik pengaturan, penilaian pribadi dan peradilan pidana.

Di dalam indeks *rule of law* terdapat kontribusi hubungan antara hukum dan ekonomi. Hal ini diperjelas oleh *world bank* bahwa supremasi hukum (*rule of law)* adalah prasyarat untuk kemajuan ekonomi dan sosial di suatu negara.

c. *Control of corruption*

Menurut *Millennium Challenge Corporation* indikator *control of corruption* digunakan untuk menilai sejauh mana kekuasaan publik dipergunakan oleh kepentingan pribadi, termasuk korupsi kecil maupun besar, serta penangkapan negara oleh pejabat pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengukur kapasitas dan efektivitas kebijakan negara dan sistem kelembagaan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Sedangkan menurut *world bank* bahwa *control of corruption* adalah sebagai tolak ukur penilaian sejauh mana kekuasaan publik dilaksanakan untuk keuntungan pribadi. Artinya dapat bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi. Korupsi menurut *world bank* adalah tindakan memberikan, menyediakan, menerima, atau menuntut sesuatu yang berharga, secara langsung maupun tidak langsung, guna memengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut.

World bank juga menganggap bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Sedangkan menurut UNDP, korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, akan

tetapi juga merusak demokrasi dengan merusak sistem institusi demokrasi serta supremasi hukum (*rule of law*).

Ugur dan Dasgupta (2011) mengatakan bahwa korupsi merupakan penyebab dan gejala kualitas institusi yang buruk, sehingga mendistorsi biaya dan insentif sebenarnya yang terkait dengan kebijakan ekonomi serta mendistorsi kapasitas suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

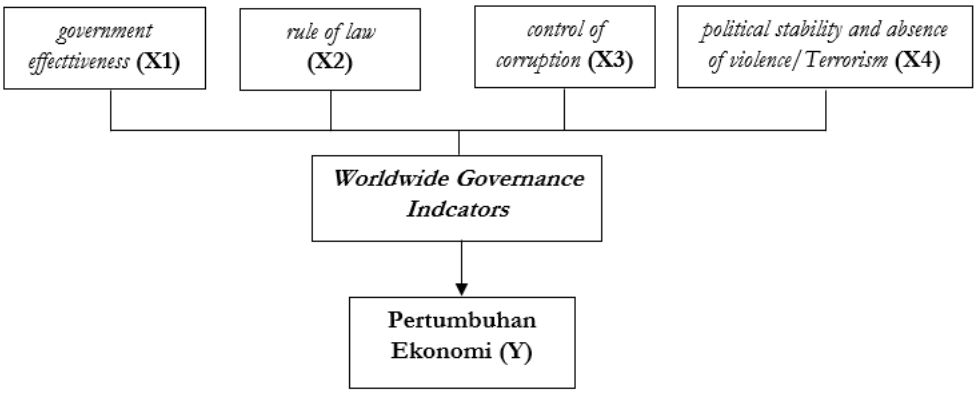
d. *Political stability and absence of violence/Terrorism*

Menurut Kaufmann dkk. (2010) bahwa *political stability and absence of violence/Terrorism* adalah ukuran persepsi tentang kemungkinan pemerintah didestabilisasi atau di kudeta melalui cara-cara yang inkonstitusional atau dengan cara kekerasan, termasuk kekerasan bermotif politik maupun terorisme. Berbagai indikator yang mengukur beragam aspek stabilitas pemerintahan,seperti aksi unjuk rasa besar, pemberontakan, kudeta, terorisme, perang sipil, konflik bersenjata, dan kelompok separatis.

Menurut Abdulrahman dkk. (2020) stabilitas politik yaitu sejauh mana sistem politik mampu memanfaatkan kondisi dan kemampuan untuk mengatasi krisis untuk menghindari konflik yang terjadi di masyarakat tanpa menggunakan kekerasan. di mana kekerasan merupakan fenomena yang terpenting dalam stabilitas politik. Kondisi stabilitas politik yang baik di suatu negara dapat memberikan suasana dan lingkungan yang diperlukan untuk keamanan, pembangunan dan kemakmuran bagi masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Pemerintah ini, variabel-variabel yang digunakan di antaranya *government effectiveness, rule of law, control of corruption*, dan *political stability and absence of violence/Terrorism* merupakan variabel independent yang memengaruhi variabel dependent yaitu Pertumbuhan Ekonomi 6 Negara di ASEAN.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan perkiraan sementara dalam sebuah penelitian yang mengharuskan adanya pengujian/ pengolahan data-data yang telah diperoleh untuk menguji kebenaran hipotesis, dan hipotesis dalam penelitian ini di antaranya:

1. Diduga *government effectiveness,* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN dari tahun 2006-2020.
2. Diduga *rule of law,* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN dari tahun 2006-2020.
3. Diduga *control of corruption*, memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN dari tahun 2006-2020.
4. Diduga *political stability and absence of violence/Terrorism* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN dari tahun 2006-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berapa besar hubungan antara pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Negara yang menjadi objek adalah enam negara di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Kamboja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari *Worldwide Governance Indicator* (*World Bank*). Data diolah menggunakan regresi data panel yaitu gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Data *cross section* dalam penelitian ini adalah 6 negara ASEAN dengan *time series* periode tahun 2006-2020 atau dalam kurun waktu 15 tahun.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independent (bebas). Pertumbuhan ekonomi sebagai sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah *government effectiveness, rule of law, control of corruption* dan *political stability and absence of violence/Terrorism*.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju pada kondisi yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan total output produksi nasional atau kenaikan pendapatan nasional dalam periode waktu tertentu. *Gross Domestic Product* juga digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan keadaan perekonomian negara dan diukur dalam bentuk persen.

Rumus = $\frac{GDPt-GDPt-1}{GDPt-1}$ X **100%**

Keterangan: GDPt = GDP konstan tahun t

GDPt-1 = GDP konstan sebelum tahun t

3.2.2 Indikator Tata Kelola Pemerintah (*World Governance Indicators*)

Menurut Kaufmann dkk. dalam Huynh dan Jacho-Chavez (2009), *World Governance Indicators* (WGI) yang tersedia di *World Bank* untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik yaitu :

a. *Government Effectiveness* (X1) sebagai tolak ukur persepsi kualitas layanan masyarakat, kualitas layanan sipil dan tingkat kemandirian dari tekanan politik, kualitas proses dan implementasi kebijakan, serta komitmen tanggung jawab dari pemerintah atas kebijakannya. Diukur dengan menggunakan indeks.
b. *Rule of law* (X2) sebagai tolak ukur persepsi sejauh mana masyarakat dan pemerintah (komitmen penegakan, hak milik, polisi, dan pengadilan) untuk mematuhi peraturan serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan demi terwujudnya ketertiban dan keamanan. Diukur dengan menggunakan indeks.
c. *Control of corruption* (X3) sebagai tolak ukur tentang sejauh mana otoritas publik dilaksanakan untuk keuntungan pribadi dan potensi terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Diukur dengan menggunakan indeks.
d. *Political stability and absence of violence/Terrorism* (X4) sebagai tolak ukur persepsi tentang kemungkinan terjadi ketidakstabilan politik dan kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme. Diukur dengan menggunakan indeks.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel, dan sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan

program *Eviews* 10. Sriyana (2014) dalam bukunya mengatakan data panel merupakan gabungan antara data silang *(cross section)* dan runtut waktu (*time series*) diperkenalkan Howles sekitar 1950. Metode regresi ini di kembangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pada saat melakukan regresi yaitu ketersediaan data, masalah heteroskedastisitas pada data *cross section*, dan masalah autokorelasi yang sering terjadi pada data *time series*, maupun masalah efisiensi dalam melakukan estimasi. Adapun persamaan model dapat dituliskan dalam model berikut :

$$\boldsymbol{Y_it = \beta_0 + \beta_(1)\, X_it + e_it}$$
$$\boldsymbol{i = 1, 2, \ldots\ldots, n}$$
$$\boldsymbol{t = 1, 2, \ldots\ldots, t}$$

di mana :

i = Jumlah unit observasi
n = Banyaknya variabel bebas
t = Banyaknya periode waktu
(n x t) = Banyaknya data panel

3.3.1 Model Regresi Data Panel

Maka bentuk regresi data panel untuk untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_{2it} X_{2it} + \beta_{3it} X_{3it} + \beta_{4it} X_{4it} + e_{it}}$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi/Nilai GDP constan2015 (Miliar US$)
X1 = *Government Effectiveness* (Indeks)
X2 = *Rule of Law* (Indeks)
X3 = *Control of corruption* (Indeks)

X4 = *Political stability and absence of violence/Terrorism* (Indeks)

i = Banyaknya observasi (6 negara anggota ASEAN)

t = Banyaknya waktu (periode 2006-2020)

e = *Error terms*

Beberapa metode dengan tiga pendekatan digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel yaitu sebagai berikut :

a. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model adalah model analisis regresi yang paling sederhana dengan cara mengombinasi data *time series* dan *cross section* ke dalam data panel yang kemudian dilakukan regresi menggunakan teknik *OLS*. Sriyana (2014) mengatakan asumsi pertama dalam model analisis regresi ini adalah menganggap intersep dan slope (kemiringan) selalu konstan antar waktu maupun antar individu.

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model adalah model analisis regresi yang menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Sriyana (2014), mengatakan terdapat dua asumsi dalam model regresi *Fixed Effect* yaitu:

1) **Asumsi slope konstanta tetapi intersep bervariasi antar unit**

   Hasil intersep pada regresi memungkinkan terjadi perubahan antar waktu dan antar individu. Dalam pendekatan *Fixed Effect* estimasi dapat dilakukan dengan memasukkan variabel semu (*dummy*) untuk menggambarkan perbedaan intersep. Model ini dapat dilakukan dengan metode regresi *Least Squares Dummy Variables* (LSDV).

2) **Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu/ unit dan antar periode waktu**

   Asumsi intersep bervariasi antara antara objek analisis individu dan dari waktu ke waktu, tetapi kemiringan (slope) masih diasumsikan konstan atau tetap.

c. Random Effect Model (REM)

Pendekatan *Random Effect Model*, konsep ditampilkan sebagai variabel acak, bukan lagi sebagai konstanta. Nilai intersep dari setiap individu bisa dinyatakan sebagai kentungan bahwa heteroskedastisitas dapat dihilangkan. Model ini dikenal dengan metode *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Squares* (GLS).

3.3.2 Penentuan Metode Regresi Data Panel

Untuk menentukan metode apa yang digunakan dalam penelitian, tahapan berikutnya melakukan uji kesesuaian model yaitu dengan uji *Chow* dan uji *Hausman*. Dimana uji *Chow* digunakan untuk menguji kesesuaian data dari metode *Pooled Least Square* dan data dari metode *fixed-effect*. Kemudian melakukan uji *hausman* untuk memilih model terbaik yang didapatkan dari hasil uji *Chow* dan metode *random effect*.

a. Uji *Chow* adalah pengujian dengan membandingkan antara model *Common Effect* dengan model *Fixed Effect* untuk mendapatkan model yang terbaik. Dengan menggunakan alpha (α) dijadikan sebagai batas kesalahan maksimum yang menjadi dasar perhitungan statistik dengan konvensi alpha yang digunakan sebesar 1% (0,01), 5% (0,05), 10% (0,10).

Berikut hipotesis uji *Chow* :

H0 : *Common Effect Models*

Ha : *Fixed Effect Models*

1. Jika p-value > α, sehingga menerima H0 dan menolak Ha maka model yang tepat digunakan yaitu *common effect models*.
2. Jika *p-value* < α, sehingga menolak H0 dan menerima Ha maka model yang tepat digunakan yaitu *fixed effect models*.

Uji statistika yang digunakan yaitu uji F-statistika dengan rumus:

$$\mathbf{F} = \frac{\boldsymbol{RSS_1 - RSS_2 / i - 1}}{(\boldsymbol{RSS_2})/(\boldsymbol{it - i - k})}$$

Keterangan :

RSS_1 : *residual sum of squares* model *common effects*

RSS_2 : *residual sum of squares* model *fixed effects.*

i : jumlah individu

t : jumlah periode waktu

k : banyak parameter dalam model *fixed effects*.

b. Uji *Hausman* adalah uji yang digunakan untuk membandingkan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* untuk mengetahui model yang paling baik.

Berikut hipotesis uji *Hausman*:

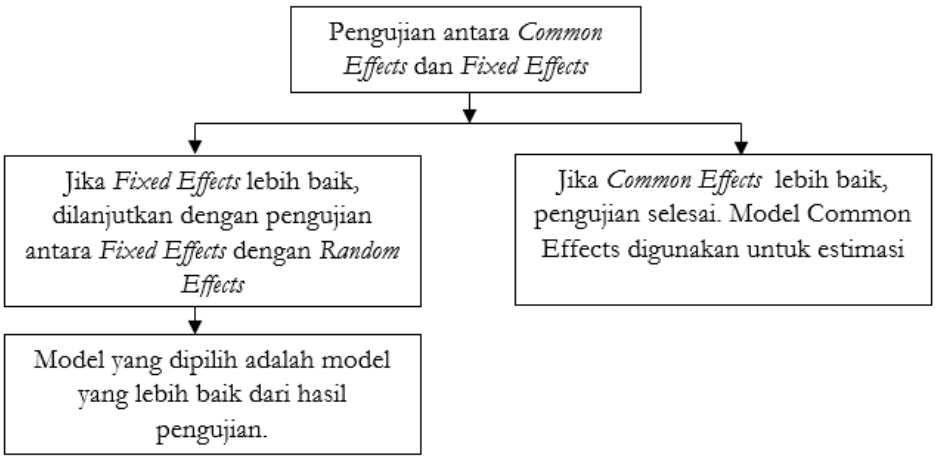
H0 : *Random Effect Models*

Ha : *Fixed Effect Models*

1. Jika *p-value* > α, sehingga menerima H0 dan menolak Ha maka model yang valid digunakan yaitu *random effect models.*
2. Jika *p-value* < α, sehingga menerima H0 dan menolak Ha maka model yang valid digunakan yaitu *fixed effect models.*

Berikut adalah hasil ringkas penjelasan tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk bagan:

Gambar 3. 1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model



Sumber: Sriyana (2014)

3.3.3 Uji Statistika

Setelah dilakukan uji penentuan model maka dilakukan uji statistik. Penelitian ini menggunakan Koefisien Determinasi (R^2), uji parsial (Uji t), dan uji simultan (Uji F).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dipergunakan untuk menilai sejauh mana variabel bebas atau variabel independen pada model untuk menjelaskan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian. Nilai ini menunjukkan seberapa dekat garis regresi yang diestimasi dengan data sebenarnya. Nilai adalah antara 0 dan 1. Semakin dekat nilainya dengan 1, semakin baik modelnya.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen keseluruhan secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat/dependen.

a. Jika p-value > alpha (α) 5% atau 0,05 artinya kita menerima H0 dan menolak Ha.

b. Jika p-value < alpha (α) 5% atau 0,05 artinya menolak H0 dan menerima Ha.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel terikat atau dependen. di dalam uji t menggunakan dua pilihan yaitu satu sisi dan dua sisi. Uji hipotesis ditunjukkan guna mengetahui apakah variabel independen memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen yaitu dengan cara membandingkan nilai t hitung dan t tabel.

a. Apabila nilai t hitung > t tabel maka menolak H0 artinya dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.
b. Sebaliknya, apabila nilai t hitung < t tabel, maka gagal menolak H0 artinya dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *World Bank* sebagai pendukung dalam penelitian, di mana pertumbuhan ekonomi (*Gross Domestic Product*/GDP) adalah variabel dependen dan *government effectiveness, rule of law, control of corruption* dan *political stability and absence of violence/Terrorism* merupakan variabel independen. Penelitian ini dilakukan pada sejumlah data *time series* dan data *cross section*, dengan periode waktu pengamatan 15 tahun dari 2006-2020 dan 6 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Kamboja.

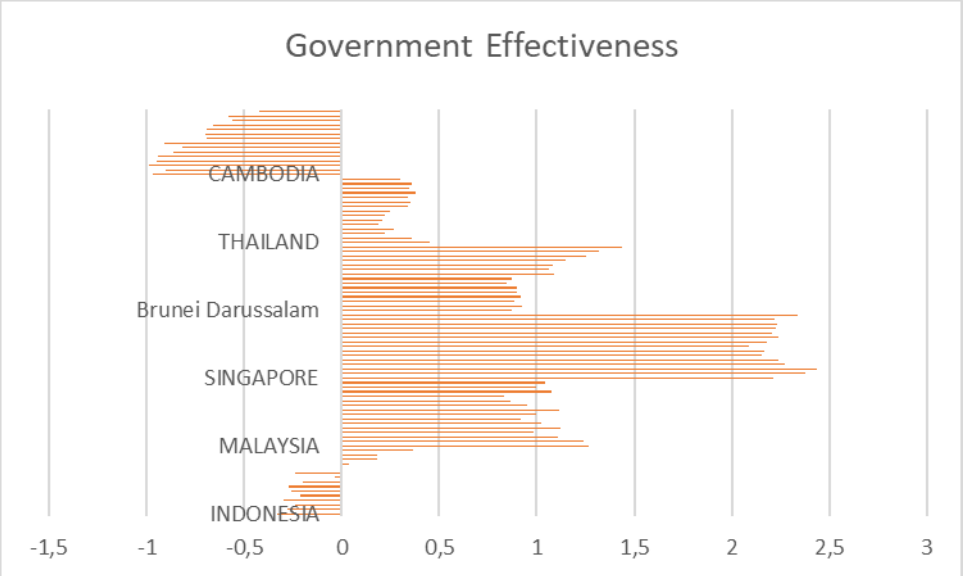
Metode yang digunakan untuk mengestimasi dalam penelitian ini adalah data panel dengan alat bantu *Eviews*10. Analisis data panel dilakukan dengan melakukan pemilihan model terbaik dengan metode pendekatan yaitu *common effect model, fixed effect model, dan random effect model*. di mana dari ketiga metode tersebut akan dipilih salah satu metode untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu uji statistik. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dari ke 4 (empat) variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

4.1.1 Government Effectiveness

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *Government Effectiveness* 6 (enam) negara anggota ASEAN tahun 2006 sampai 2020 yang diperoleh dari *World Bank* dengan satuan Indeks. Berdasarkan grafik 4.1, setiap negara memiliki variasi nilai indeks *government effectiveness* yang fluktuatif. Menurut *World Bank* nilai tertinggi indeks *government effectiveness* adalah sebesar 2.5 dan terendah sebesar – 2.5. Dalam penelitian ini kondisi *government effectiveness* tertinggi dalam 15 tahun terakhir dengan nilai indeks mendekati 2.5 yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 2.2, kemudian diikuti Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand yang artinya efektivitas

dan kualitas layanan pemerintah negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand sangat baik, sedangkan kondisi *government effectiveness* terendah dalam 15 tahun terakhir yaitu Kamboja dengan nilai indeks rata-rata sebesar – 0.7 diikuti Indonesia sebesar – 0.1, artinya efektivitas dan kualitas layanan pemerintah negara Kamboja dan Indonesia belum cukup baik.

Gambar 4. 1 *Government Effectiveness* di 6 Negara ASEAN 2006-2020



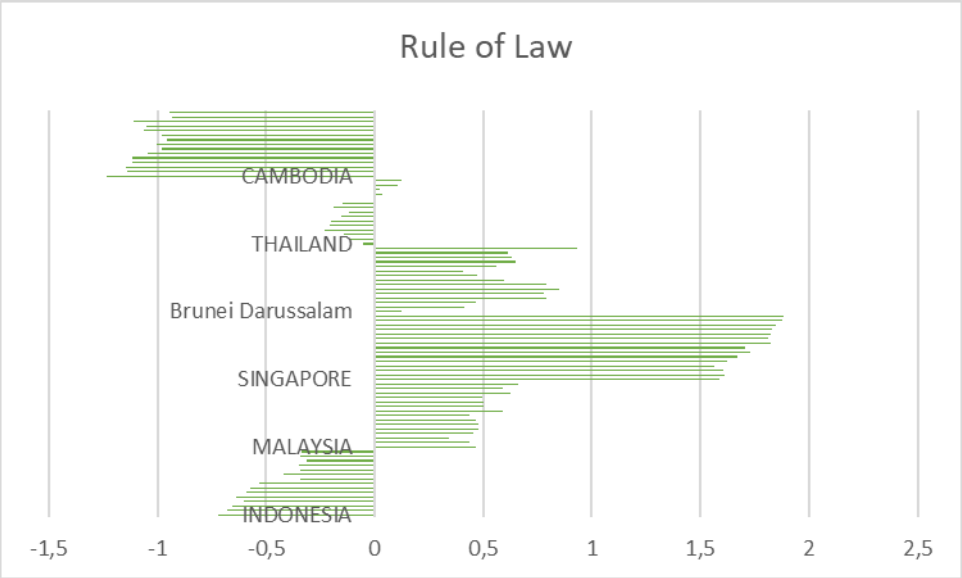
Sumber: *World Bank* 2021, data diolah

4.1.2 Rule of Law

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *Rule of Law* 6 (enam) negara anggota ASEAN tahun 2006 sampai 2020 yang diperoleh dari *World Bank* dengan satuan Indeks. *Rule of Law* menjelaskan persepsi sejauh mana seseorang mematuhi aturan hukum dan menegakkan hukum. Berdasarkan kondisi grafik 4.2 indeks *rule of law* dari ke 6 (enam) negara ASEAN tahun 2006 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Menurut *World Bank* nilai tertinggi indeks *rule of law* adalah sebesar 2.5 dan terendah sebesar – 2.5. Adapun nilai indeks *rule of law* tertinggi yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 1.7, diikuti Brunei Darussalam sebesar 0.6 dan Malaysia sebesar 0.5,

artinya bahwa Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia memiliki kualitas *rule of law* yang cukup baik. Sedangkan nilai indeks rule of law terendah yaitu Kamboja dengan nilai rata-rata sebesar – 1.05, kemudian diikuti Thailand sebesar – 0.08 dan Indonesia sebesar – 0.4, artinya kualitas *rule of law* negara Kamboja, Thailand dan Indonesia buruk.

Gambar 4. 2 Rule of Law di 6 Negara ASEAN 2006-2020



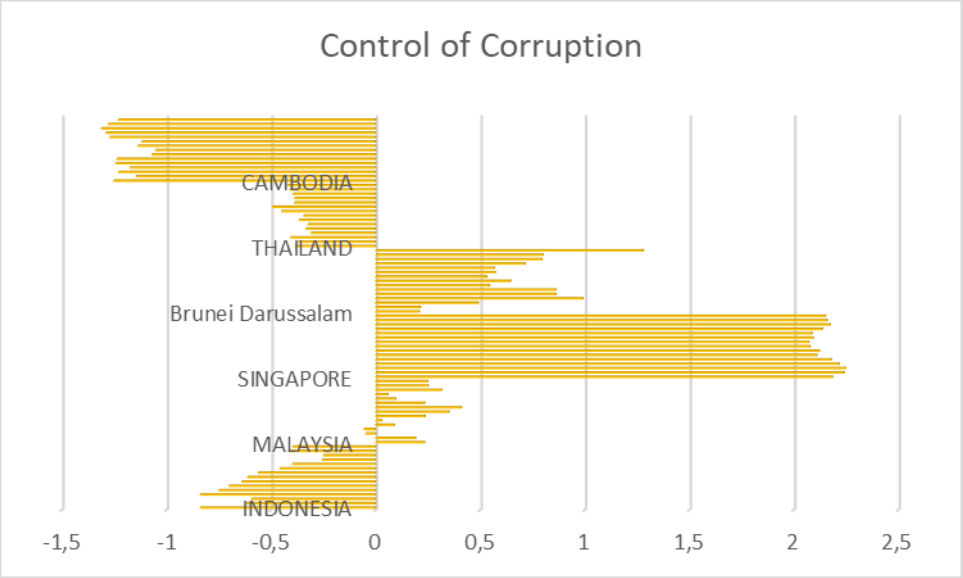
Sumber: *World Bank* 2021, data diolah

4.1.3 Control of Corruption

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *control of corruption* 6 (enam) negara anggota ASEAN tahun 2006 sampai 2020 yang diperoleh dari *World Bank* dengan satuan Indeks. *Control of corruption* merupakan persepsi kemampuan negara untuk melakukan pengendalian serta pencegahan korupsi. Berdasarkan grafik 4.3 indeks *control of corruption* dari ke 6 (enam) negara ASEAN dalam 15 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Menurut *World Bank* nilai tertinggi indeks adalah sebesar 2.5 dan terendah sebesar – 2.5. Adapun nilai indeks *control of corruption* tertinggi yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 2.1,

kemudian diikuti Brunei Darussalam sebesar 0.67 dan Malaysia sebesar 0.17, artinya pengendalian korupsi negara Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia sangat baik. Sedangkan nilai indeks *control of corruption* terendah yaitu negara Kamboja dengan nilai rata-rata sebesar – 1.2, diikuti Indonesia sebesar – 0.55 dan Thailand sebesar – 0.38, yang artinya pengendalian korupsi di negara Kamboja, Indonesia dan Thailand buruk.

Gambar 4. 3 *Control of Corruption di 6 Negara ASEAN 2006-2020*



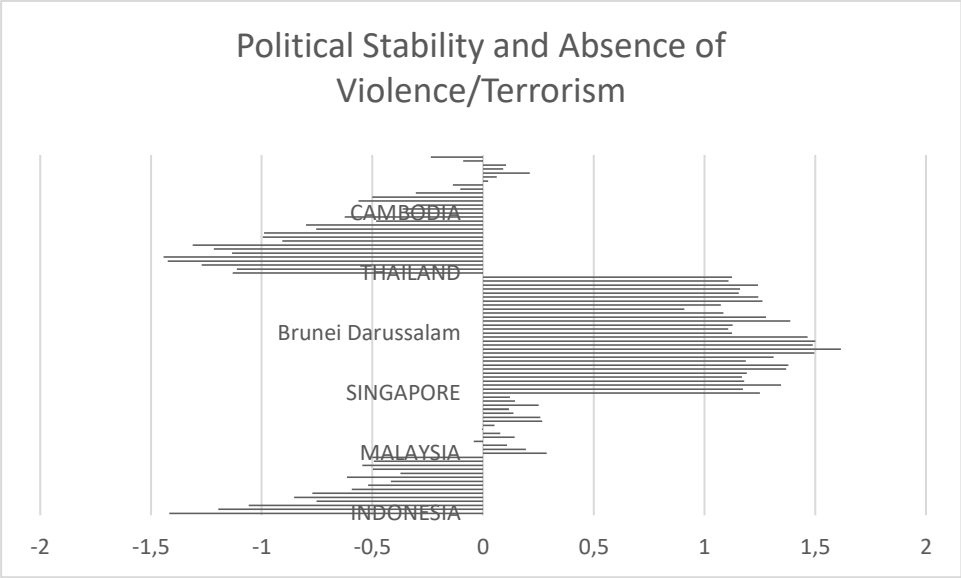
Sumber: *World Bank* 2021, data diolah

4.1.4 Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *political stability and absence of violence/terrorism* 6 (enam) negara anggota ASEAN tahun 2006 sampai 2020 yang diperoleh dari *World Bank* dengan satuan Indeks. *Political stability and absence of violence/terrorism* sebagai tolak ukur persepsi tentang kemungkinan terjadi ketidakstabilan politik dan atau kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme. Berdasarkan grafik 4.3 indeks *political stability and absence of violence/terrorism* dari ke 6 (enam) negara ASEAN dalam 15 tahun terakhir masih dinilai fluktuatif. Menurut *World Bank* nilai indeks tertinggi

adalah sebesar 2.5 dan terendah sebesar – 2.5. Nilai indeks *political stability and absence of violence/terrorism* tertinggi yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 1.34, diikuti Brunei Darussalam sebesar 1.15 dan Malaysia sebesar 0.14, artinya stabilitas politik dan pengendalian terorisme di negara Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia sangat baik. Adapun nilai indeks terendah yaitu Thailand dengan nilai rata-rata sebesar – 1.03, kemudian diikuti Indonesia sebesar – 0.7 dan Kamboja sebesar – 0.16 artinya stabilitas politik di negara Thailand, Indonesia dan Kamboja belum cukup baik atau buruk.

Gambar 4. 4 Political Stability And Absence Of Violence/Terroris di 6 Negara ASEAN 2006-2020



Sumber: *World Bank* 2021, data diolah

4.2 Hasil dan Analisis Data

4.2.1 Common Effect Model (CEM)

Hasil metode *Common Effect Model* dengan menggunakan pengujian regresi data panel adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 **Hasil Estimasi Common Effect Model**

Dependent Variable: LOGGDP
Method: Panel Least Squares
Date: 12/16/21 Time: 01:02
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.14685	0.267037	94.16976	0.0000
GE	0.837532	0.590631	1.418029	0.1598
RL	0.552022	0.778716	0.708887	0.4803
CC	0.446935	0.453193	0.986190	0.3268
PSAV	-2.172622	0.173624	-12.51334	0.0000

R-squared	0.689837	Mean dependent var	25.57725
Adjusted R-squared	0.675241	S.D. dependent var	1.606338
S.E. of regression	0.915414	Akaike info criterion	2.715073
Sum squared resid	71.22858	Schwarz criterion	2.853951
Log likelihood	-117.1783	Hannan-Quinn criter.	2.771077
F-statistic	47.26233	Durbin-Watson stat	0.123059
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Eviews10*, data diolah 2021

4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Hasil metode *Common Effect Model* dengan menggunakan pengujian regresi data panel adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 **Hasil Estimasi Fixed Effect Model**

Dependent Variable: LOGGDP
Method: Panel Least Squares
Date: 12/16/21 Time: 01:04
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.32018	0.067326	376.0823	0.0000
GE	0.172289	0.113842	1.513401	0.1341
RL	0.822050	0.160705	5.115262	0.0000
CC	-0.372618	0.126403	-2.947864	0.0042
PSAV	0.315045	0.087102	3.616972	0.0005

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993931	Mean dependent var	25.57725
Adjusted R-squared	0.993248	S.D. dependent var	1.606338
S.E. of regression	0.131995	Akaike info criterion	-1.107674
Sum squared resid	1.393804	Schwarz criterion	-0.829917
Log likelihood	59.84531	Hannan-Quinn criter.	-0.995666
F-statistic	1455.680	Durbin-Watson stat	0.497784
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Eviews10*, data diolah 2021

4.2.3 Random Effect Model (REM)

Hasil metode *Common Effect Model* dengan menggunakan pengujian regresi data panel adalah sebagai berikut :

***Tabel 4. 3* Hasil Estimasi Random Effect Model**

Dependent Variable: LOGGDP
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/16/21 Time: 01:05
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.27542	0.140425	179.9925	0.0000
GE	0.287948	0.107093	2.688757	0.0086
RL	1.079280	0.151487	7.124580	0.0000
CC	-0.636161	0.120356	-5.285646	0.0000
PSAV	-0.022594	0.079737	-0.283352	0.7776

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.311836	0.8481
Idiosyncratic random	0.131995	0.1519

Weighted Statistics

R-squared	0.280203	Mean dependent var	2.778811
Adjusted R-squared	0.246331	S.D. dependent var	0.257003
S.E. of regression	0.223115	Sum squared resid	4.231321
F-statistic	8.272230	Durbin-Watson stat	0.197210
Prob(F-statistic)	0.000011		

Unweighted Statistics

R-squared	0.067333	Mean dependent var	25.57725
Sum squared resid	214.1857	Durbin-Watson stat	0.003896

Sumber: *Eviews10*, data diolah 2021

4.3 Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model dalam penelitian ini didasarkan pada uji statistik. Untuk mendapatkan pemilihan model terbaik dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yaitu *Common Effect Model, Fixed Effect Model,* dan *Random Effect Model.* Adapun pengujian yang dapat dilakukan antara lain, yaitu uji *Chow* (uji F-Statistik)

digunakan untuk memilih model terbaik dengan membandingkan antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, dan uji *Hausman* digunakan untuk memilih model terbaik dengan membandingkan antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Dari hasil pengujian yang dilakukan akan menunjukkan model terbaik sehingga kemudian digunakan dalam penelitian.

4.3.1 Uji Chow

Dengan melakukan pengujian ini memilih model terbaik antara *Common Effects Model* dan *Fixed Effects Model* dengan ketentuan hipotesis sebagai berikut :

H0 : *Common Effect Model*

Ha : *Fixed Effect Model*

Uji *Chow* dapat dilakukan dengan melihat p-value apabila signifikan kurang dari alpha 5% atau 0.05 (< 5% atau 0.05) maka model estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sedangkan p-value tidak signifikan lebih dari alpha 5% atau 0.05 (> 5% atau 0.05) maka model estimasi yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

***Tabel 4. 4* Uji *Chow* (Uji F-Statistik)**

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	801.659565	(5,80)	0.0000
Cross-section Chi-square	354.047161	5	0.0000

Sumber: *Eviews10*, data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji *chow* pada tabel 4.4 diperoleh bahwa nilai probabilitas (*p-value*) F-statistik sebesar 0.0000. Dengan menggunakan

tingkat signifikansi alpha (α) 5% atau 0.05 artinya p-value kurang dari alpha (α) 5% atau 0.05. Sehingga dapat disimpulkan menolak H0 dan menerima Ha, maka keputusan sementara model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

4.3.2 Uji Hausman

Dengan melakukan pengujian ini memilih model terbaik antara *Random Effects Model* dan *Fixed Effects Model* dengan ketentuan hipotesis sebagai berikut :

H0 : *Random Effect Model*

Ha : *Fixed Effect Model*

Uji Hausman dapat dilakukan dengan melihat p-value apabila signifikan kurang dari alpha (α) 5% atau 0.05 (< 5% atau 0.05) maka model estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sedangkan p-value tidak signifikan lebih dari alpha (α) 5% atau 0.05 (> 5% atau 0.05) maka model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model*.

***Tabel 4. 5* Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	161.864589	4	0.0000

Sumber: *Eviews10*, data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji *chow* pada tabel 4.5 diperoleh bahwa nilai probabilitas (*p-value*) Cross-section Random Effects sebesar 0.0000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi alpha (α) 5% atau 0.05 artinya p-value Cross-section random effects kurang dari alpha (α) 5% atau 0.05. Sehingga

dapat disimpulkan menolak H0 dan menerima Ha, maka model terbaik yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

4.3.3 Hasil Model Terbaik *Fixed Effect Model*

Demikian dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model terbaik yang tepat digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan estimasi data panel, di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu serta individu. Berikut adalah hasil estimasi *Fixed Effect Model* :

Dependent Variable: LOGGDP
Method: Panel Least Squares
Date: 12/16/21 Time: 01:04
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.32018	0.067326	376.0823	0.0000
GE	0.172289	0.113842	1.513401	0.1341
RL	0.822050	0.160705	5.115262	0.0000
CC	-0.372618	0.126403	-2.947864	0.0042
PSAV	0.315045	0.087102	3.616972	0.0005

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993931	Mean dependent var	25.57725
Adjusted R-squared	0.993248	S.D. dependent var	1.606338
S.E. of regression	0.131995	Akaike info criterion	-1.107674
Sum squared resid	1.393804	Schwarz criterion	-0.829917
Log likelihood	59.84531	Hannan-Quinn criter.	-0.995666
F-statistic	1455.680	Durbin-Watson stat	0.497784
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil estimasi regresi data panel serta menggunakan *Fixed Effect Model* di atas memperoleh hasil sebagai berikut :

$$lnGDP_{it} = \beta 0 + \beta 1 GE_{it} + \beta 2 RL_{it} - \beta 3 CC_{it} + \beta 4 PSAV_{it} + e_{it}$$

$$lnGDP_{it} = 25.32018 + 0.172289\ GE_{it} + 0.822050\ RL_{it} - 0.372618\ CC_{it} + 0.315045\ PSAV_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

$lnGDP_{it}$ = Log Pertumbuhan Ekonomi

GE = *Government Effectiveness* (indeks)

RL = *Rule of Law* (indeks)

CC = *Control of Corruption* (indeks)

PSVA = *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* (indeks)

Dari hasil estimasi *fixed effect* sebagai berikut :

1. Variabel GE dalam pengujian regresi *fixed effect model* diperoleh koefisien sebesar 0.172289 bernilai positif. Sedangkan probabilitas variabel GE sebesar 0.1341 menunjukkan tidak signifikan.
2. Variabel RL dalam pengujian regresi *fixed effect model* diperoleh koefisien sebesar 0.822050 bernilai positif. Sedangkan probabilitas variabel RL sebesar 0.0000 menunjukkan signifikan.
3. Variabel CC dalam pengujian regresi *fixed effect model* diperoleh koefisien sebesar – 0.372618 bernilai negatif. Sedangkan probabilitas variabel CC sebesar 0.0042 menunjukkan signifikan.
4. Variabel PSAV dalam pengujian regresi *fixed effect model* diperoleh koefisien sebesar 0.315045 bernilai positif. Sedangkan probabilitas variabel PSAV sebesar 0.0005 menunjukkan signifikan.

4.4 Uji Statistik

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan dari hasil regresi data panel menggunakan estimasi *Fixed Effect Model* didapatkan nilai R-Squared sebesar 0.993931 atau 99.3931%, menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *Government Effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption dan Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, sedangkan sisanya sebesar 0.006069 atau 0.6069% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

4.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah signifikan atau tidak signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan).

Diketahui nilai F statistik *Fixed Effect Model* sebesar 0,000000 < alpha (α) 5% atau 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen yaitu *Government Effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption dan Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (GDP).

4.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah signifikan atau tidak signifikan variabel independen terhadap variabel dependen (*Government Effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption dan Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi/GDP) secara individu (parsial).

***Tabel 4. 6* Uji t**

Variable	Coefficient	Probabilitas	Keterangan
C	25.32018	0.0000	Signifikan
GE	0.172289	0.1341	Tidak Signifikan
RL	0.822050	0.0000	Signifikan
CC	-0.372618	0.0042	Signifikan
PSAV	0.315045	0.0005	Signifikan
Alpha (α) 5% atau 0.05 dan 10% atau 0.1			

Sumber: *Eviews10*, data diolah 2021

1. *Government Effectiveness*

   Berdasarkan hasil estimasi diperoleh bahwa nilai koefisien variabel *Government Effectiveness* (GE) sebesar 0.172289 dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.1341 > alpha (α) 5% atau 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Government Effectiveness* (GE) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN : (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Kamboja).

2. *Rule of Law*

   Berdasarkan hasil estimasi diperoleh bahwa nilai koefisien variabel *Rule of Law* (RL) sebesar 0.822050 dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0000 < alpha (α) 5% atau 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Rule of Law* (RL) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN : (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Kamboja).

3. *Control of Corruption*

   Berdasarkan hasil estimasi diperoleh bahwa nilai koefisien variabel *Control of Corruption* (CC) sebesar – 0.372618 dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0042 < alpha (α) 5% atau 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Control of Corruption* (CC) berpengaruh

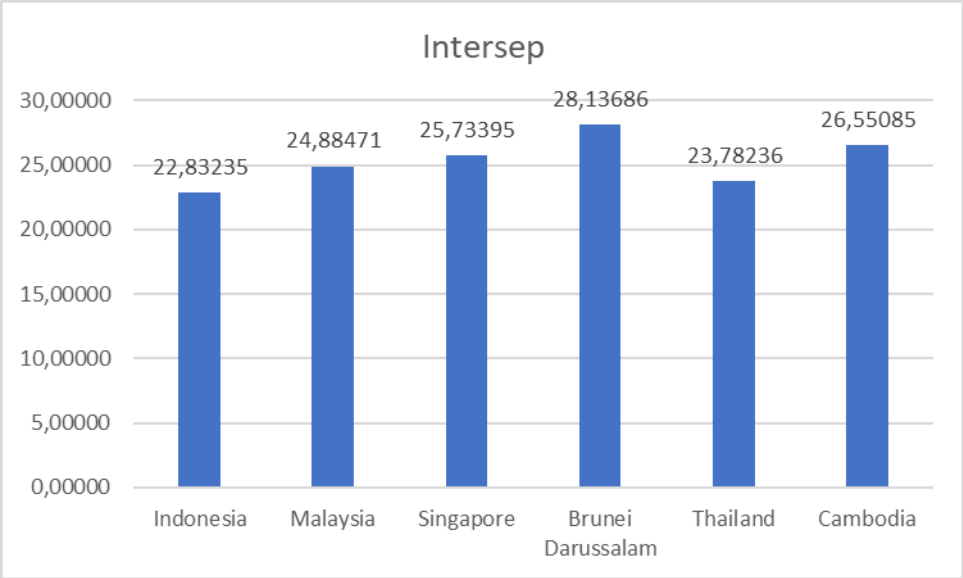
negatif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN : (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Kamboja).

4. *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism*

   Berdasarkan hasil estimasi diperoleh bahwa nilai koefisien variabel *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* (PSAV) sebesar 0.315045 dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0005 < alpha (α) 5% atau 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* (PSAV) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN : (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Kamboja).

4.5 Pembahasan dan Interpretasi Data

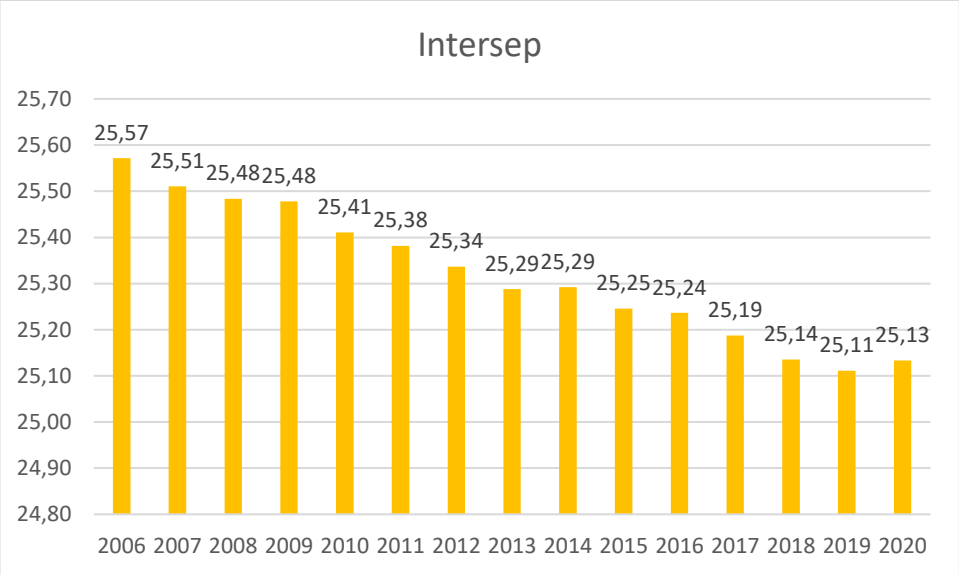
Gambar 4. 5 **Nilai Intersep atau konstanta Cross Effect**



Berdasarkan hasil estimasi Cross Effect *fixed effect* pada grafik gambar 4.5 menunjukkan nilai masing-masing 6 (enam) negara anggota ASEAN 2006 sampai 2020. Dilihat dari grafik gambar tersebut bahwa nilai intersep atau konstanta pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu negara Brunei Darussalam sebesar

28.13686, kemudian diikuti oleh negara Kamboja sebesar 26.55085 dan negara Singapura sebesar 25.73395. Sedangkan negara dengan nilai intersep atau konstanta pertumbuhan ekonomi terendah yaitu negara Indonesia sebesar 22.83235, kemudian diikuti oleh negara Thailand sebesar 23.78236 dan negara Malaysia sebesar 24.88471.

Gambar 4. 6 Nilai Intersep atau konstanta Period Effect



Berdasarkan hasil estimasi Period Effect *fixed effect* pada grafik gambar 4.6 menunjukkan nilai masing-masing 6 (enam) negara anggota ASEAN 2006 sampai 2020. Dilihat dari grafik gambar tersebut bahwa nilai intersep atau konstanta pertumbuhan ekonomi Period secara umum mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan.

4.5.1 Analisis Pengaruh Variabel *Government Effectiveness* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 Negara ASEAN

Berdasarkan estimasi *fixed effect model* pada variabel *Government Effectiveness* (GE) menunjukkan pengaruh tidak signifikan akan tetapi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN. Diketahui variabel *Government Effectiveness* memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.1341 > alpha (α) 5% dengan koefisien 0.172289. Artinya ketika *Government Effectiveness* naik 1 satuan maka tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN. Dimana *Government Effectiveness* adalah sebuah sistem yang berada di dalam pemerintahan dan dalam prosesnya sangat di pengaruhi oleh teknologi informasi. Dalam laporan *United Nations e-Government Development Index* negara-negara ASEAN dinilai belum cukup baik. Meskipun *Government Effectiveness* dinilai baik, tetapi tidak diikuti dengan penggunaan teknologi informasi yang baik pula, maka *Government Effectiveness* tidak akan berjalan optimal.

Dwiyanto (2018), penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang sederhana dan membantu birokrasi pemerintah untuk memperkecil peluang terjadinya *moral hazard* dalam interaksi warga negara dan pemerintah. Menurut *World Bank* dalam Mariono (2019), untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* perlunya adanya pemanfaatan teknologi informasi (*e-Government)* oleh lembaga pemerintahan melalui *Wide Area Network, Internet, Mobile Computing* yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan yang baik dan efisien sehingga dapat mengurangi tindakan korupsi, meningkatkan transparansi, kenyamanan, pertumbuhan pendapatan dan serta pengurangan biaya.

4.5.2 Analisis Pengaruh Variabel *Rule of Law* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 Negara ASEAN

Berdasarkan estimasi *fixed effect model* pada variabel *Rule of Law* (RL) menunjukkan pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap

pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN. Diketahui variabel *Rule of Law* memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 < alpha (α) 5% dengan koefisien 0.822050. Artinya ketika *Rule of Law* naik 1 satuan maka akan menambah atau menaikkan pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN sebesar 0.822050 %.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayar (2016) di mana *Rule of Law* memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil sejalan juga ditunjukkan oleh Resnick dan Birner (2006) dalam penelitiannya, yang menyatakan bahwa *Rule of Law* memiliki hubungan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan *Rule of Law* mampu membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi pemerintah yang korup. Di mana pemerintah yang taat terhadap aturan hukum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan tanggung jawab atas kewenangannya. Lembaga penegak hukum menjamin pemerintahan berjalan dengan bersih dan berfungsi dengan baik, sehingga diharapkan dapat berdampak luas pada kemajuan ekonomi serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

4.5.3 Analisis Pengaruh Variabel *Control of Corruption* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 Negara ASEAN

Berdasarkan estimasi *fixed effect model* pada variabel *Control of Corruption* (CC) menunjukkan pengaruh signifikan akan tetapi memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN. Diketahui variabel *Control of Corruption* memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0042 < alpha (α) 5% dengan koefisien – 0.315045. Artinya ketika *Control of Corruption* naik 1 satuan maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN sebesar 0.315045 %. Sehingga ketika *Control of Corruption* disuatu negara itu lemah atau banyak terjadi korupsi maka akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini menurut Leff dalam Aidt (2009), mengatakan bahwa korupsi merupakan kontribusi yang efisien untuk melicinkan roda perdagangan serta korupsi memiliki efek positif terhadap pertumbuhan

ekonomi dan atau investasi. Menurut Huntington dalam Irawanti (2015), mengatakan bahwa korupsi berperan sebagai insentif finansial yang memungkinkan para pengusaha untuk menghindari keterlambatan sehingga dalam prosesnya lebih efisien dibandingkan dengan jika proses transaksi ini melibatkan sektor publik.

Hal ini senada juga yang dilakukan penelitian Assagaf (2020), dimana korupsi yang bersifat "*speed money*" memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dengan keberadaan suap maka para pengusaha terhindar dari adanya penundaan birokrasi, sehingga diperlukan untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan. Sehingga *control of corruption* dapat bersifat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

4.5.4 Analisis Pengaruh Variabel *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 Negara ASEAN

Berdasarkan estimasi *fixed effect model* pada variabel *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* (PSAV) menunjukkan pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN. Diketahui variabel *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0005 < alpha (α) 5% dengan koefisien 0.315045. Artinya ketika *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* naik 1 satuan maka akan menambah atau menaikkan pertumbuhan ekonomi di 6 negara anggota ASEAN sebesar 0.315045 %.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huynh dan Jacho-Chávez (2009) menyatakan bahwa *Political Stability And Absence Of Violence* memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik dapat diartikan sebagai pola sikap dan perilaku di seluruh elemen politik yang membangun struktur dan hubungan kekuasaan untuk menjamin efektivitas pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dalam dua hal yaitu pemerintah yang stabil artinya kemampuan pemerintah menjalankan program sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Kedua, sistem pemerintah yang stabil artinya dapat menerima perubahan sosial yg

terjadi di masyarakat tanpa mengubah sistem pemerintahan yang ada. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayar (2016) di mana *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik merupakan keteguhan dan kekuatan suatu pemerintahan atau rezim untuk menjaga kestabilan politik. Di mana pemerintah sering sekali mengalami penyalahgunaan kekuasaan seperti peristiwa-peristiwa kudeta, dan kerap terjadinya pergantian kabinet yang mengarah pada perubahan kebijakan ekonomi. Maka dari itu stabilitas politik merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Penelitian ini menggunakan variabel *government effectiveness, rule of law, control of corruption* dan *political stability and absence of violence/Terrorism* terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN dengan menggunakan regresi data panel dan memperoleh hasil model terbaik yaitu *Fixed Effect Model*. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel *Government Effectiveness* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 (enam) negara ASEAN. Artinya ketika *Government Effectiveness* meningkat, maka tidak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Variabel *Rule of Law* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 (enam) negara ASEAN. Artinya ketika *Rule of Law* meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Variabel *Control Of Corruption* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 (enam) negara ASEAN. Artinya ketika *Control Of Corruption* meningkat akan berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi.
4. Variabel *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 (enam) negara ASEAN. Artinya ketika *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

5.2 Implikasi

Dari hasil kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka didapatkan implikasi sebagai berikut :

1. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) sehingga dalam proses pembangunan dapat menerapkan kebijakan yang baik, guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
2. Institusi pemerintah perlu adanya dukungan teknologi informasi yang baik dalam menjalankan *Government Effectiveness* agar optimal guna pelayanan yang lebih ekeftif dan efisien, akuntanbel dan transparan.
3. Pemerintah, masyarakat dan pelaku ekonomi diharapkan meningkatkan kesadaran dalam menegakkan hukum atau *Rule of law* guna menjadi pemerintahan yang bersih dan terhindar dari tindakan korupsi. Sehingga membawa dampak bagi kemajuan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Pemerintah dan lembaga anti korupsi negara diharapkan meningkatkan kualitas kelembagaan agar *Control of Corruption* berjalan dengan baik dan dapat mengurangi tindakan korupsi di mana akan mendistorsi kapasitas suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
5. Meningkatkan *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* atau stabilitas politik menjadi hal yang penting dan diperhatikan bagi pemerintahan suatu negara dalam meningkatkan perekonomian. Pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan kondisi dan kemampuan untuk mengatasi krisis untuk menghindari konflik yang terjadi di masyarakat agar stabilitas politik dan perekonomian stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman, E., Hamid, A. A., & Saif, A. (2020). The impact of Political Stability and Absence of Violence / Terrorism on foreign direct investment flows in the Arab countries. *North American Academic Research*, *3*(01), 1–20.

Aidt, T. . (2009). Corruption, Institutions, and Economic Development. Oxford Review of Economic Policy, 25(2), 271–291

Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1–35. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404

Aprilia & Hariyati. (2014). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Di Negara ASEAN-6. *Media Ekonomi, Volume 22.*

Asbarini1, N. F. E., & , Laili Isnaini2, M. G. W. (2021). No Title. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *Volume 12*.

Assagaf, I. (2020). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara di ASEAN). Universitas Islam Indonesia.

Bayar, Y. (2016). Public governance and economic growth in the transitional economies of the European Union. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, *2016*(48), 5–18.

Badun, M. (2006). The Quality Of Governance And Economic Growth In Croatia. Occasional Paper No. 29

Bedane, B. G., Kitenge, E., & Alam, M. R. (2017). Government Effectiveness and Economic Growth. *Volume 37 , Issue 1 This paper employs a System Generalized Method of Moments (System GMM) technique to examine the impact of. January*.

Daniel Kaufmann, A. K. and M. M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. *Draft Policy Research Working Paper*.

Demarani, F. (2018). The Effect Of Government Governance And Tax Ratio to Economic Growth (Case Study In Asean Countries). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *7*(2), 195–222.

Dewi dan Triaryati. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga Dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 4, 2015: 866-878*

Dwiyanto (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Gaol, M. L. (2016). Pengaruh Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN. Universitas Diponegoro.

Haggard, S., MacIntyre, A., & Tiede, L. (2008). The Rule of Law and Economic Development. *Annu. Rev. Polit. Sci. 2008.11:205-234*

Hakim, A. (2016). Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi). *Civil Service*, *10*(1), 15–34.

Handayani, A., & Nur, M. I. (2019). *Implementasi Good Governance Di Indonesia 1 Fitria Andalus Handayani, 2 Mohamad Ichsana Nur 1*. *11*(1), 1–11.

Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, *2*(3), 148–158. https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1989

Huynh, Kim P. dan David T. Jacho-Chávez. 2009. Growth and Governance: A Nonparametric Analysis. *Journal of Comparative Economics 37 ; 121–143*

Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, *28*(2), 188–216. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881

Irawanti, I. (2015). Pengaruh Good Local Governance, Net Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Korupsi (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia).

Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M., Dunn, G., Karatnycky, A., Fullenbaum, R., Williamson, A., Bellver, A., Weber, S., Cingranelli, D., Richards, D., Writer, R., Wolkers, M., McLiesh, C., Gibney, M., MacCormac, C., Seligson, M., Kite, E., Hart, E., … Cieslikowsky, D. (2005). *Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004 We would like to thank S. Radelet for excellent feedback, and M.* http://econ.worldbank.org.www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/.TheAppendicesandasynthesisofthepaperareavailableat:www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters4.html.

Kharisma, B. (2014). Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Buletin Studi Ekonomi*, *19*(1), 11.

Mankiw, N Gregory. 2006. Makro Ekonomi. Jakarta. Erlangga

Mariono, S. (2019). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Michael P. Todaro dan Stephen C.Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Kesembilan).Erlangga.https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Muh Adnan Pratama Annur. (2019). *Pengaruh Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun 2007-2017*. Universitas Islam Indonesia.

Ozpolat, A., Guven, G. G., Ozsoy, F. N., & Bahar, A. (2016). Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively? *Research in World Economy*, *7*(1). https://doi.org/10.5430/rwe.v7n1p107

Ramadhan, M. (2019). Assessing of the impact of good governance and institutions on economic growth in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, *8*(11), 2594–2598.

Razak, A., & Suhadak. (2019). Pengaruh Worldwide Governance Indicators Dan Macroeconomic Terhadap IHSG (Studi pada Negara Indonesia , Malaysia , Filipina , Singapura , dan Thailand Tahun. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *70*(1), 1–10.

Resnick & Birner. (2006). Does Good Governance Contribute to Pro-poor Growth? A Review of Thevidence from Cross-Country Studies. *DSGD Discussion. 30*

Rudra P. Pradhan and G. S. Sanyal. (2011). Good governance and human development: Evidence form Indian States. *Journal of Social and Development Science*, *Vol. 1*, *No.*

Sari & Kaluge. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Asean Member Countries Pada Tahun 2011-2016. *Jibeka Volume 11 Nomor 1.*

Sofie Dwi Rifayani, Priyatno Harsasto, R. M. (2013). Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokratisasi Dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal ilmu pemerintahan*. *1*(1), 1–9.

Sriyana, J. (2014). Metode Regresi Data Panel, Ekonesia. Yogyakarta.

Sukirno, Sadono. 2008. Makroekonomi Teori Pengantar. Raja Grafindo Persada

Syaifullah, A. & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4. Jurnal *Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 1/2017 Hal. 107 – 119*

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Economic development. *Edition 12*

Tunggal, Amin Widjaja. 2013. Internal Audit & Good Corporate Governance. Jakarta: Harvarindo.

Ugur, M., & Dasgupta, N. (2011). Corruption and economic growth: A meta-analysis of the evidence on low-income countries and beyond. *Munich Personal RePEc Archive No.31226*, *April*, 1–43.

Waluyo, J. (2010). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbungan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara. *Buletin Ekonomi*, *8*(2), 159–170.

Wibowo, E. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, 1–14.

World Bank (2021). Combating Corruption. Combating Corruption (worldbank.org)

World Bank. (2021). World Governance Indicators.

Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi Ekonomi Dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkembang. Telaah Pendekatan Ekonomi Islam. *Al-Tijary*, *1*(1), 1–22.

LAMPIRAN

Data penelitian di 6 negara ASEAN : GDP Constan 2015, *Government Effectiveness* (GE), *Rule of Law* (RL), *Control of Corruption* (CC), *Political Stability And Absence Of Violence/Terrorism* (PSAV).

Lampiran 1 DATA PENELITIAN

Negara	Tahun	GDP	GE	RL	CC	PSAV
Indonesia	2006	5,25E+11	-0,33159	-0,71903	-0,83842	-1,41704
Indonesia	2007	5,58E+11	-0,2772	-0,68147	-0,61902	-1,1963
Indonesia	2008	5,92E+11	-0,2372	-0,65387	-0,5937	-1,05838
Indonesia	2009	6,19E+11	-0,29813	-0,60262	-0,83865	-0,75139
Indonesia	2010	6,58E+11	-0,21437	-0,63998	-0,75156	-0,85392
Indonesia	2011	6,98E+11	-0,25945	-0,593	-0,70185	-0,77011
Indonesia	2012	7,41E+11	-0,273	-0,57565	-0,63979	-0,59326
Indonesia	2013	7,82E+11	-0,19895	-0,53082	-0,61366	-0,51926
Indonesia	2014	8,21E+11	-0,03757	-0,34228	-0,56173	-0,41682
Indonesia	2015	8,61E+11	-0,24088	-0,42217	-0,45836	-0,61506
Indonesia	2016	9,04E+11	0,007411	-0,34489	-0,39921	-0,37295
Indonesia	2017	9,5E+11	0,038376	-0,34968	-0,25485	-0,4979
Indonesia	2018	9,99E+11	0,180583	-0,31549	-0,24974	-0,54591
Indonesia	2019	1,05E+12	0,182051	-0,34242	-0,41603	-0,4934
Indonesia	2020	1,03E+12	0,369162	-0,33874	-0,39742	-0,50021
Malaysia	2006	1,97E+11	1,267115	0,467347	0,234054	0,287723
Malaysia	2007	2,1E+11	1,238987	0,437705	0,192051	0,193773
Malaysia	2008	2,2E+11	1,108519	0,344933	-0,04731	0,108325
Malaysia	2009	2,17E+11	0,983706	0,455968	-0,05648	-0,04238
Malaysia	2010	2,33E+11	1,120302	0,478181	0,089305	0,143352
Malaysia	2011	2,45E+11	1,021066	0,478674	0,029523	0,07741
Malaysia	2012	2,58E+11	0,919737	0,465009	0,237454	-0,00521
Malaysia	2013	2,71E+11	0,999857	0,435685	0,350235	0,051792
Malaysia	2014	2,87E+11	1,114984	0,588215	0,411289	0,266619
Malaysia	2015	3,01E+11	0,948642	0,501822	0,235252	0,258958
Malaysia	2016	3,15E+11	0,865416	0,499128	0,09614	0,136825
Malaysia	2017	3,33E+11	0,834842	0,497697	0,059031	0,11641
Malaysia	2018	3,49E+11	1,075026	0,623343	0,316121	0,251569
Malaysia	2019	3,64E+11	0,997468	0,591614	0,252059	0,143877
Malaysia	2020	3,44E+11	1,041389	0,658679	0,249496	0,121676
Singapore	2006	1,94E+11	2,212474	1,586578	2,185165	1,250259
Singapore	2007	2,12E+11	2,375459	1,612359	2,241867	1,174122

Singapore	2008	2,15E+11	2,436975	1,606087	2,247644	1,345581
Singapore	2009	2,16E+11	2,270797	1,566005	2,217089	1,179446
Singapore	2010	2,47E+11	2,241065	1,625962	2,180155	1,169415
Singapore	2011	2,63E+11	2,154623	1,66993	2,109778	1,191422
Singapore	2012	2,74E+11	2,165925	1,731099	2,123504	1,368175
Singapore	2013	2,88E+11	2,089236	1,705421	2,077939	1,378178
Singapore	2014	2,99E+11	2,182681	1,824715	2,07166	1,186271
Singapore	2015	3,08E+11	2,236045	1,813336	2,093367	1,311753
Singapore	2016	3,18E+11	2,20568	1,825398	2,088079	1,495759
Singapore	2017	3,33E+11	2,223338	1,827708	2,137123	1,61567
Singapore	2018	3,44E+11	2,230585	1,844995	2,174483	1,487936
Singapore	2019	3,49E+11	2,220709	1,878919	2,159583	1,500786
Singapore	2020	3,3E+11	2,3353	1,880382	2,151986	1,465074
Brunei Darussalam	2006	1,31E+10	0,873299	0,122821	0,207792	1,124461
Brunei Darussalam	2007	1,31E+10	0,924397	0,412539	0,214669	1,106725
Brunei Darussalam	2008	1,29E+10	0,888503	0,465149	0,491154	1,126965
Brunei Darussalam	2009	1,27E+10	0,918072	0,788691	0,991409	1,387627
Brunei Darussalam	2010	1,3E+10	0,901702	0,779217	0,863385	1,277547
Brunei Darussalam	2011	1,35E+10	0,896932	0,84996	0,861644	1,085194
Brunei Darussalam	2012	1,36E+10	0,8434	0,793017	0,545805	0,909327
Brunei Darussalam	2013	1,33E+10	0,869797	0,594529	0,646115	1,074022
Brunei Darussalam	2014	1,3E+10	1,086186	0,472453	0,53139	1,261507
Brunei Darussalam	2015	1,29E+10	1,059632	0,407877	0,572723	1,242662
Brunei Darussalam	2016	1,26E+10	1,083784	0,561681	0,568482	1,154172
Brunei Darussalam	2017	1,28E+10	1,146735	0,649717	0,715172	1,160305
Brunei Darussalam	2018	1,28E+10	1,251249	0,629349	0,795956	1,24136
Brunei Darussalam	2019	1,33E+10	1,317982	0,614343	0,802283	1,108799
Brunei Darussalam	2020	1,34E+10	1,438427	0,931135	1,28122	1,123706
Thailand	2006	3,03E+11	0,451717	-0,05577	-0,38426	-1,13041
Thailand	2007	3,19E+11	0,361483	-0,11896	-0,3695	-1,11144

Thailand	2008	3,25E+11	0,220506	-0,14025	-0,40779	-1,27144
Thailand	2009	3,23E+11	0,267293	-0,23019	-0,30971	-1,42479
Thailand	2010	3,47E+11	0,187649	-0,20469	-0,33395	-1,44279
Thailand	2011	3,5E+11	0,205803	-0,2039	-0,32344	-1,13353
Thailand	2012	3,75E+11	0,224576	-0,15108	-0,36622	-1,21663
Thailand	2013	3,85E+11	0,247892	-0,1206	-0,34342	-1,31168
Thailand	2014	3,89E+11	0,337657	-0,19146	-0,45023	-0,90639
Thailand	2015	4,01E+11	0,349844	-0,14779	-0,49341	-0,99443
Thailand	2016	4,15E+11	0,341752	-0,00496	-0,38887	-0,98858
Thailand	2017	4,32E+11	0,382022	0,037312	-0,38815	-0,75284
Thailand	2018	4,51E+11	0,34788	0,022749	-0,39684	-0,79967
Thailand	2019	4,61E+11	0,356567	0,103169	-0,41137	-0,48368
Thailand	2020	4,33E+11	0,300701	0,121309	-0,42222	-0,62454
Cambodia	2006	1,02E+10	-0,96664	-1,23454	-1,25365	-0,34772
Cambodia	2007	1,13E+10	-0,9038	-1,14224	-1,14504	-0,36298
Cambodia	2008	1,2E+10	-0,98876	-1,1483	-1,23138	-0,30047
Cambodia	2009	1,2E+10	-0,9451	-1,11806	-1,17474	-0,56256
Cambodia	2010	1,28E+10	-0,94297	-1,1185	-1,24337	-0,50098
Cambodia	2011	1,37E+10	-0,86274	-1,04499	-1,23873	-0,30442
Cambodia	2012	1,46E+10	-0,81591	-0,97962	-1,07003	-0,10358
Cambodia	2013	1,57E+10	-0,90653	-1,00416	-1,05222	-0,13644
Cambodia	2014	1,69E+10	-0,68945	-0,95532	-1,13779	0,023175
Cambodia	2015	1,8E+10	-0,69969	-0,97853	-1,11815	0,061942
Cambodia	2016	1,93E+10	-0,69423	-1,06389	-1,27275	0,211038
Cambodia	2017	2,06E+10	-0,65963	-1,05389	-1,28983	0,091222
Cambodia	2018	2,22E+10	-0,56027	-1,11207	-1,31198	0,103042
Cambodia	2019	2,37E+10	-0,58005	-0,93571	-1,27986	-0,08949
Cambodia	2020	2,3E+10	-0,41941	-0,9458	-1,23125	-0,23588

Lampiran 2 *Common Effect Model*

Dependent Variable: LOGGDP
Method: Panel Least Squares
Date: 12/16/21 Time: 01:02
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.14685	0.267037	94.16976	0.0000
GE	0.837532	0.590631	1.418029	0.1598
RL	0.552022	0.778716	0.708887	0.4803
CC	0.446935	0.453193	0.986190	0.3268
PSAV	-2.172622	0.173624	-12.51334	0.0000

R-squared	0.689837	Mean dependent var	25.57725
Adjusted R-squared	0.675241	S.D. dependent var	1.606338
S.E. of regression	0.915414	Akaike info criterion	2.715073
Sum squared resid	71.22858	Schwarz criterion	2.853951
Log likelihood	-117.1783	Hannan-Quinn criter.	2.771077
F-statistic	47.26233	Durbin-Watson stat	0.123059
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3 *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOGGDP
Method: Panel Least Squares
Date: 12/16/21 Time: 01:04
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.32018	0.067326	376.0823	0.0000
GE	0.172289	0.113842	1.513401	0.1341
RL	0.822050	0.160705	5.115262	0.0000
CC	-0.372618	0.126403	-2.947864	0.0042
PSAV	0.315045	0.087102	3.616972	0.0005

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993931	Mean dependent var	25.57725
Adjusted R-squared	0.993248	S.D. dependent var	1.606338
S.E. of regression	0.131995	Akaike info criterion	-1.107674
Sum squared resid	1.393804	Schwarz criterion	-0.829917
Log likelihood	59.84531	Hannan-Quinn criter.	-0.995666
F-statistic	1455.680	Durbin-Watson stat	0.497784
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4 *Random Effect Model*

Dependent Variable: LOGGDP
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/16/21 Time: 01:05
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.27542	0.140425	179.9925	0.0000
GE	0.287948	0.107093	2.688757	0.0086
RL	1.079280	0.151487	7.124580	0.0000
CC	-0.636161	0.120356	-5.285646	0.0000
PSAV	-0.022594	0.079737	-0.283352	0.7776

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.311836	0.8481
Idiosyncratic random	0.131995	0.1519

Weighted Statistics

R-squared	0.280203	Mean dependent var	2.778811
Adjusted R-squared	0.246331	S.D. dependent var	0.257003
S.E. of regression	0.223115	Sum squared resid	4.231321
F-statistic	8.272230	Durbin-Watson stat	0.197210
Prob(F-statistic)	0.000011		

Unweighted Statistics

R-squared	0.067333	Mean dependent var	25.57725
Sum squared resid	214.1857	Durbin-Watson stat	0.003896

Lampiran 5 Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	801.659565	(5,80)	0.0000
Cross-section Chi-square	354.047161	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOGGDP
Method: Panel Least Squares
Date: 12/16/21 Time: 01:07
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.14685	0.267037	94.16976	0.0000
GE	0.837532	0.590631	1.418029	0.1598
RL	0.552022	0.778716	0.708887	0.4803
CC	0.446935	0.453193	0.986190	0.3268
PSAV	-2.172622	0.173624	-12.51334	0.0000

R-squared	0.689837	Mean dependent var	25.57725
Adjusted R-squared	0.675241	S.D. dependent var	1.606338
S.E. of regression	0.915414	Akaike info criterion	2.715073
Sum squared resid	71.22858	Schwarz criterion	2.853951
Log likelihood	-117.1783	Hannan-Quinn criter.	2.771077
F-statistic	47.26233	Durbin-Watson stat	0.123059
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6 Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	161.864589	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GE	0.172289	0.287948	0.001491	0.0027
RL	0.822050	1.079280	0.002878	0.0000
CC	-0.372618	-0.636161	0.001492	0.0000
PSAV	0.315045	-0.022594	0.001229	0.0000

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LOGGDP
Method: Panel Least Squares
Date: 12/16/21 Time: 01:09
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.32018	0.067326	376.0823	0.0000
GE	0.172289	0.113842	1.513401	0.1341
RL	0.822050	0.160705	5.115262	0.0000
CC	-0.372618	0.126403	-2.947864	0.0042
PSAV	0.315045	0.087102	3.616972	0.0005

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993931	Mean dependent var	25.57725
Adjusted R-squared	0.993248	S.D. dependent var	1.606338
S.E. of regression	0.131995	Akaike info criterion	-1.107674
Sum squared resid	1.393804	Schwarz criterion	-0.829917
Log likelihood	59.84531	Hannan-Quinn criter.	-0.995666

F-statistic	1455.680	Durbin-Watson stat	0.497784
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7 Intersep Cross *Effect*

No.	NEGARA	Cross Effect	Koefisien	Nilai Intersep
1	Indonesia	2,487831	25,32018	22,83235
2	Malaysia	0,435475	25,32018	24,88471
3	Singapore	-0,413773	25,32018	25,73395
4	Brunei Darussalam	-2,816675	25,32018	28,13686
5	Thailand	1,537816	25,32018	23,78236
6	Cambodia	-1,230674	25,32018	26,55085

Lampiran 8 Intersep Period Effect

No.	DATEID	Period Effect	Koefisien	Intersep
1	1/1/2006	-0,25139	25,32018	25,5716
2	1/1/2007	-0,19027	25,32018	25,5104
3	1/1/2008	-0,16342	25,32018	25,4836
4	1/1/2009	-0,15786	25,32018	25,4780
5	1/1/2010	-0,09032	25,32018	25,4105
6	1/1/2011	-0,06152	25,32018	25,3817
7	1/1/2012	-0,01648	25,32018	25,3367
8	1/1/2013	0,032353	25,32018	25,2878
9	1/1/2014	0,027666	25,32018	25,2925
10	1/1/2015	0,074191	25,32018	25,2460
11	1/1/2016	0,083844	25,32018	25,2363
12	1/1/2017	0,132935	25,32018	25,1872
13	1/1/2018	0,184427	25,32018	25,1358
14	1/1/2019	0,208698	25,32018	25,1115
15	1/1/2020	0,187132	25,32018	25,1330